



# RENSTRA



## TAHUN 2018 - 2023

# BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BONE



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi pembangunan perdagangan selama periode 2018-2023 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone. Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bone ini menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan yang termaksud pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone.

Rencana Strategis ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan perdagangan. Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tersebut. Demikian pula indikator pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan setiap pada akhir tahun anggaran.

Demikian Rencana Strategis ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan sektor perdagangan Kabupaten Bone.

Watampone, Februari 2019

**Pt. KEPALA BPBD KAB. BONE**



**H. A. SURYA DARMA, SE. M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip. 19600424 198702 1 004

DAFTAR ISI

SAMPUL .....i

KATA PENGANTAR .....ii

DAFTAR ISI.....iii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

1.1.Latar Belakang..... 1

1.2.Landasan Hukum ..... 3

1.3.Maksud dan Tujuan ..... 7

1.4.Sistematika Penulisan ..... 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ..... 9

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ..... 9

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ..... 17

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 23

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ... 47

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..... 51

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... 51

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..... 54

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra ..... 57

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS ..... 59

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis ..... 68

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ..... 69

4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah ..... 69

4.2. Sasaran Jangka Menengan Perangkat Daerah ..... 69

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 71

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .... 73

BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN..... 82

BAB VIII PENUTUP..... 84

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Didalam perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan atas-bawah/bawah-atas. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistic-tematik, integrative, dan spasial.

Dalam pasal 11 ayat (3) huruf a Permendagri 86 Tahun 2017 Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam penyusunan renstra, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tanggal 24 Januari 2007 menyampaikan Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mengurangi resiko bencana. Selanjutnya, pada tanggal 26 April 2007 disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kedua perangkat hukum tersebut di atas merupakan komitmen pemerintah untuk mengurangi resiko bencana dan membangun masyarakat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi ancaman bencana. Selain itu, keduanya juga merupakan landasan hukum terbentuknya lembaga penanggulangan bencana baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone pada tanggal 04 Nopember 2010 telah mensahkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, dimana PERDA ini merupakan dasar hukum terbentuknya lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone yang akan menyelenggarakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bone.

Permasalahan penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Bone semakin kompleks pada era reformasi dan pengaruh global saat ini. Sejalan dengan itu, pelaksanaan otonomi daerah dan tuntutan reformasi serta terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta PERDA Nomor 04 Tahun 2010 mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone untuk menata landasan dan kebijakan serta program-program penanggulangan bencana di daerah ini. Dalam penataan ini, maka perangkat-perangkat hukum tersebut diatas menjadi acuannya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan suatu perencanaan penanggulangan bencana yang menganut prinsip-prinsip cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabel, kemitraan, pemberdayaan dan nondiskriminatif yang memuat rencana penanggulangan ancaman Kebakaran, banjir, angin kencang (puting beliung) dan tanah longsor baik pada saat bencana, maupun pada tahap pasca bencana dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023, yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Bone.

Proses/tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi tahap persiapan penyusunan renstra, penyusunan rancangan awal renstra perangkat daerah, penyusunan rancangan renstra perangkat daerah, forum perangkat daerah, verifikasi rancangan renstra perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir renstra perangkat daerah, dan penetapan renstra perangkat daerah.

Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan

dijalankan selama lima tahun kedepan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
22. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan di Kab/Kota;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;



33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009);.
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten Bone;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2012-2032;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak;
43. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengurustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
44. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
45. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kabupaten Bone;
46. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Dana Sosial Perusahaan
47. Peraturan Bupati Bone Nomor 28 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Badan, Unsur Pengarah, Umsur Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud dari penyusunan renstra ini adalah untuk memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 tahun kedepan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone.

#### **b. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi pedoman dalam upaya pencapaian kondisi masa depan Kabupaten Bone, juga untuk memahami arah kebijakan dan tujuan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bone.
- b. Mengidentifikasi isu-isu strategis yang menjadi dasar penyusunan visi , misi , kebijakan , strategi dan program serta kegiatan penanggulangan bencana daerah pada pelaksanaan tahapan pembangunan jangka menengah 2018-2023.
- c. Mensinergikan program-program strategis pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana.
- d. Sebagai Pedoman dalam menyusun serangkaian tindakan pilihan yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bone.
- e. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah terkait dan seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Kabupaten Bone agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018-2023 secara sistematis terdiri dari delapan (8) bab, adalah sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**, Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang diuraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum,

defenisi Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD.

**Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah,** Pada bab ini dikemukakan tentang tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah, sumberdaya Perangkat daerah, tantangan dan peluang pelayanan Perangkat daerah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

**Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah,** Pada bab ini dikemukakan secara ringkas tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan Telaahan Renstra K/L dan Renstra, dan Telaahan tentang RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

**Bab IV Tujuan dan Sasaran,** Pada bab ini, tujuan jangka menengah Perangkat Daerah, dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan,** Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan,** Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,** Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**Bab VIII Penutup,** Pada bagian ini dikemukakan tentang pentingnya rencana strategis dan merupakan penutup dari dokumen rencana strategis dan harapan kepada semua pihak yang berkepentingan agar menjadikan renstra ini sebagai penunjuk arah dan pedoman untuk melaksanakan pembangunan BPBD Kab. Bone pada periode 2018-2023.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, maka kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Dalam hubungan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup penanggulangan bencana daerah yaitu menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah dengan rincian tugas sbb :

##### **a. Tugas Pokok dan Fungsi**

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penangan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN, APBD dan sumber dana lainnya
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bonemempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
3. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana daerah sesuai petunjuk dan arahan Bupati Bone.

b. Uraian Tugas Pokok :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekontruksi akibat bencana secara adil dan merata ;
2. Merumuskan, menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana;
4. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyusunan, penetapan, dan pengembangan informasi peta rawan bencana ;
5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengembangan informasi daerah rawan bencana ;
6. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur tetap penangulungan bencana ;
7. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
8. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana ;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas ; dan
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

- c. Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone adalah Unsur Pengarah dan Unsur pelaksana  
Untuk mengetahui dengan jelas mengenai Fungsi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana dapat diuraikan sebagai berikut:

**1. Unsur pengarah**

Unsur pengarah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Memantau dan;
- c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

**2. Unsur pelaksana**

Unsur pelaksana mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi;
- b. Komando;
- c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- d. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada BPBD Kabupaten Bone. Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 28 tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Badan, Unsur Pengarah, Unsur Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone maka untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, unsur pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana dengan rincian sbb :

**1) . Kepala Badan**

Mempunyai tugas pokok menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional terhadap usaha Penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.

Kepala Badan Mempunyai Tugas :



- a. Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan bencana dan Penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan Efisien
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
- c. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan
- d. Meyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
- e. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
- f. Melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya.
- g. Melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- h. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- i. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- j. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **2) Unsur Pengarah**

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam Penanggulangan Bencana. Untuk melaksanakan tugas, unsur Pengarah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah
- b. Memantau dan
- c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

## **3) Kepala Pelaksana**

Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan Penanggulangan Bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana saat tanggap darurat dan pascabencana.

Untuk melaksanakan tugas, unsur pelaksana mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana
- b. Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana
- c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

#### **4) Sekretaris**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai Fungsi :

- a. Pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi dilingkungan BPBD
- b. Menyusun perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan Peraturan perundang – undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga BPBD
- d. Pembinaan dan Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD
- e. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah BPBD
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Sekretariat terdiri dari 3 ( tiga ) Sub.bagian :

- a. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub.Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Sub. Bagian Program

#### **5) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Mempunyai tugas pokok mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
- c. Pelaksanaan Hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- d. Melakukan Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
- e. Melaksanakan Tugas – tugas lain yang diberikan pimpinan.

- ◆ Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari 2 (Dua) seksi :
  - a. Seksi Pengurangan Resiko Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat.
  - b. Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan

6). **Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik**

Mempunyai tugas pokok mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan umum di bidang penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat serta bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- c. Penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- f. Melaksanakan tugas – Tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari 2 (Dua) Seksi :

- a. Seksi Tanggap Darurat
- b. Seksi Perbaikan dan bantuan darurat.

7) **Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan umum di bidang Penanggulangan Bencana pada pascabencana.

- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana
- c. Penyusunan Perencanaan di bidang Penanggulangan Bencana Pascabencana.
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.  
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari 2 (Dua) seksi:
  - a. Seksi Penilaian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Fisik
  - b. Seksi Pemulihan, Peningkatan Sosial Ekonomi dan Penanganan Pengungsi.

#### e. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, maka stuktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone, terdiri dari 1(satu) Kepala Badan Penanggulangan Bencana setingkat eselon IIa (secara ex-officio), 1(satu) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana setingkat eselon IIb, 1(satu) Sekretaris, 3(tiga) Kepala Bidang setingkat eselon IIIb dan 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian/Seksi setingkat eselon IVa.

Secara terperinci diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretariat  
Sekretariat terdiri dari :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan
  - Sub Bagian Program.
2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.  
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:
  - Seksi Pengurangan Resiko Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat.
  - Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan
3. Bidang Kedaruratan dan Logistik.  
Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :

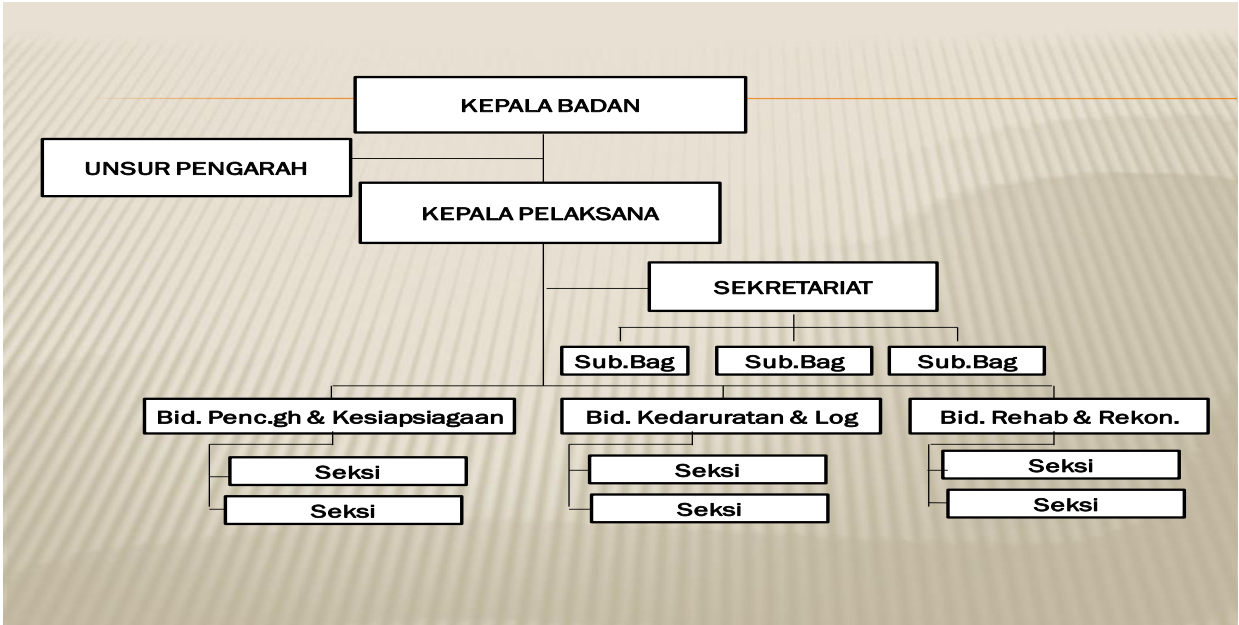
- Seksi Tanggap Darurat
  - Seksi Perbaikan dan Bantuan Darurat
4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:
- Seksi Penilaian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Fisik
  - Seksi Pemulihan, Peningkatan Sosial Ekonomi dan Penanganan Pengungsi

Berdasarkan pada Eselonisasi, maka Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, terdiri dari :

1. Kepala Badan (Eselon IIa) 1 orang
2. Kepala Pelaksana Badan (Eselon IIb) 1 orang.
3. Sekretaris (Eselon IIIb) 1 orang
4. Kepala Bidang (Eselon IIIb) 3 orang
5. Tim Pengarah (Non Eselon)
6. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi (Eselon IVa) 9 (sembilan) orang.
7. Staf sebanyak sesuai kebutuhan.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1



Sumber :

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

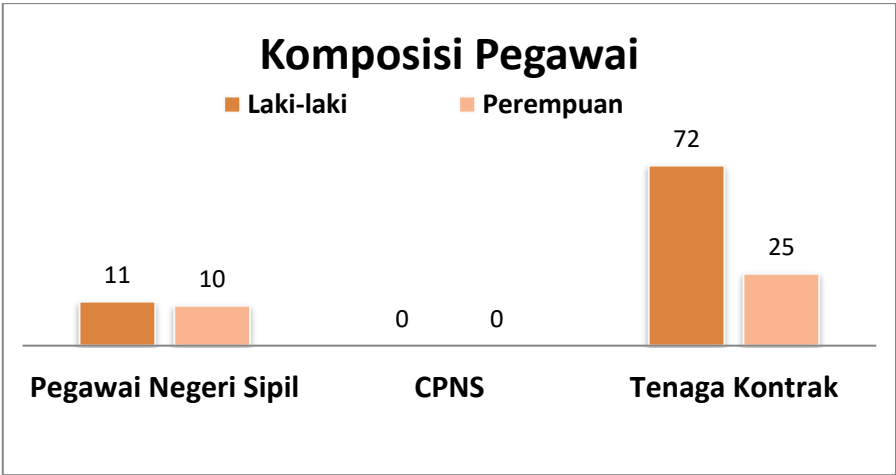
2.2.1 Sumber Daya Manusia (Personalia)

BPBD Kabupaten Bone saat ini memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 84orang pegawai, terdiri atas 21 orang PNS dan 97 orang tenaga kontrak. Ditinjau dari segi tingkat pendidikan, golongan, eselonering/ jabatan dan segi Pendidikan dan Pelatihan Jabatan, kondisi Sumber Daya Manusia BPBD disajikan pada Tabel berikut ini :

2.2.1. Komposisi Pegawai

| No | Klasifikasi Pegawai  | Jumlah |    | Persentase % |    |
|----|----------------------|--------|----|--------------|----|
|    |                      | L      | P  | L            | P  |
| 1  | Pegawai Negeri Sipil | 11     | 10 | 53           | 47 |
| 2  | CPNS                 | -      | -  | -            | -  |
| 3  | Tenaga Kontrak       | 72     | 25 | 74           | 25 |

Gambar 2

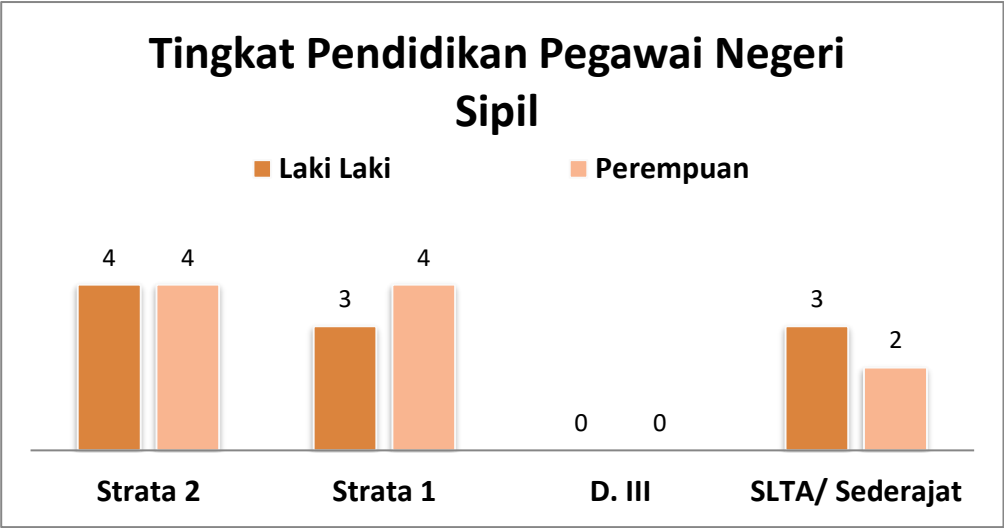


2.2.2 Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil

| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah |   | Persentase (%) |    |
|----|--------------------|--------|---|----------------|----|
|    |                    | L      | P | L              | P  |
| 1  | Strata 2           | 4      | 4 | 19             | 19 |
| 2  | Strata 1           | 3      | 4 | 14             | 19 |
| 3  | D. III             | 1      | - | 5              | -  |
| 4  | SLTA/ Sederajat    | 3      | 2 | 14             | 10 |



Gambar 3



2.2.3 Tingkat Golongan

| No | Golongan     | Jumlah |   | Persentase (%) |    |
|----|--------------|--------|---|----------------|----|
|    |              | L      | P | L              | P  |
| 1  | Golongan IV  | 5      | 1 | 24             | 5  |
| 2  | Golongan III | 3      | 7 | 14             | 33 |
| 3  | Golongan II  | 3      | 2 | 14             | 10 |
| 4  | Golongan I   | -      | - | -              | -  |

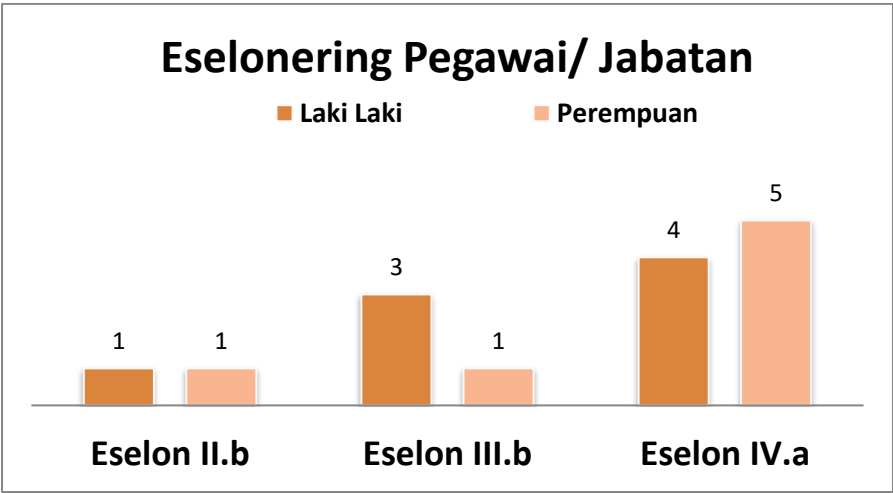
Gambar 4



2.2.4 Eselonering Pegawai/ Jabatan

| No | Eselon       | Jumlah |   | Keterangan |    |
|----|--------------|--------|---|------------|----|
|    |              | L      | P | L          | P  |
| 1  | Eselon II.b  | 1      | - | 5          | -  |
| 2  | Eselon III.b | 3      | 1 | 14         | 5  |
| 3  | Eselon IV.a  | 4      | 5 | 19         | 24 |

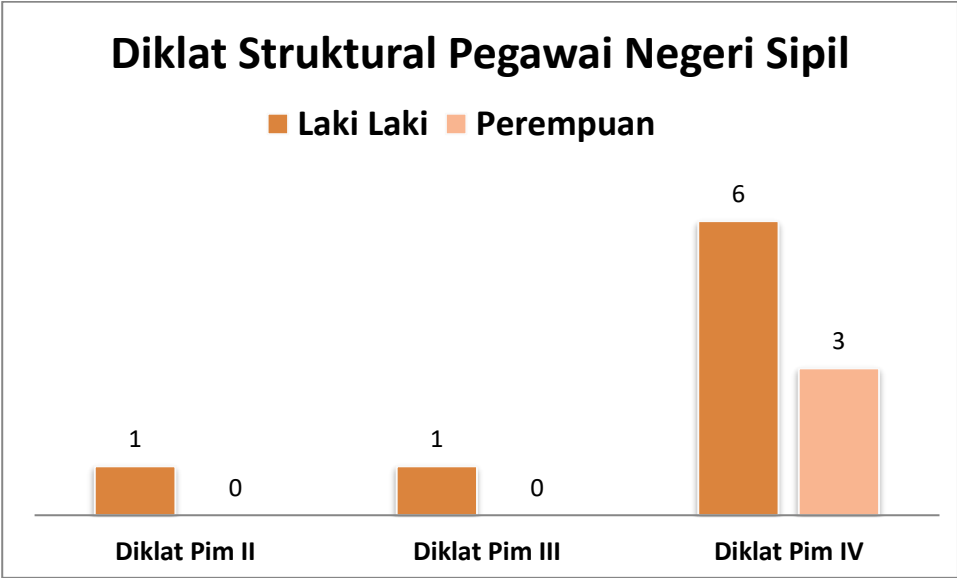
Gambar 5



2.2.5 Diklat Struktural Pegawai Negeri Sipil

| No | Diklat Formal  | Jumlah |   | Persentase (%) |   |
|----|----------------|--------|---|----------------|---|
|    |                | L      | P | L              | P |
| 1  | Diklat Pim II  | 1      | - | 5              | - |
| 2  | Diklat Pim III | 1      | - | 5              | - |
| 3  | Diklat Pim IV  | 6      | 3 | 28             |   |

Gambar 6



Asset

Sarana dan Prasarana yang tersedia pada BPBD Kabupaten Bone, digambarkan sebagai berikut :

2.2.6 Asset peralihan dari Badan Kesbangpol Kabupaten Bone

| NO | NAMA JENIS BARANG | JUMLAH | KEADAAN BARANG | KETERANGAN |
|----|-------------------|--------|----------------|------------|
| 1  | Perahu Karet      | 1 Unit | Rusak berat    | Gudang     |
| 2  | Life Jacket       | 6 Unit | Rusak berat    | Gudang     |
| 3  | Tenda Keluarga    | 1 Unit | Rusak berat    | Gudang     |
| 4  | Senter Dapur Umum | 2 Unit | Rusak berat    | Gudang     |
| 5  | Rimbui            | 1 Unit | Rusak berat    | Gudang     |
| 6  | Mic Sandang       | 1 Unit | Rusak berat    | Gudang     |

|    |                    |        |             |             |
|----|--------------------|--------|-------------|-------------|
| 7  | Derek ( troler)    | 1 Unit | Rusak berat | Gudang      |
| 8  | Peta Rupa Bumi     | 1 Buah | Rusak berat | Gudang      |
| 9  | Tenda Platon       | 1 Buah | Rusak berat | Gudang      |
| 10 | Fiber              | 1 Unit | Rusak berat | Gudang      |
| 11 | Meja Rapat         | 1 Buah | Rusak berat | Gudang      |
| 12 | Kompor Dapur Umum  | 1 Set  | Rusak berat | Gudang      |
| 13 | Meja Kantor        | 1 Buah | Rusak berat | Gudang      |
| 14 | Kursi              | 4 Buah | Rusak berat | Gudang      |
| 15 | Mesin Perahu Karet | 2 Buah | Baik        | Gudang      |
| 16 | Panci              | 1 Set  | Baik        | Gudang      |
| 17 | Ranet              | 1 Unit | Baik        | Kantor BPBD |

2.2.7 Asset yang bersumber dari APBD Kabupaten Bone :

| NO | NAMA JENIS BARANG   | JUMLAH | KEADAAN BARANG | PEMEGANG SEMENTARA  |
|----|---------------------|--------|----------------|---------------------|
| 1  | Mobil Innova        | 1 Unit | Baik           | H.BAHAR KADIR,SH,MH |
| 2  | Komputer PC         | 2 Unit | Baik           | Kantor BPBD         |
| 3  | Printer             |        |                |                     |
|    | - Epson LQ          | 4 Unit | Baik           | Kantor BPBD         |
|    | - HP LaserJet       | 1 Unit | Baik           | Kantor BPBD         |
| 4  | Meja Kerja Pimpinan | 1 Unit | Baik           | Kantor BPBD         |

|     |                    |         |       |   |
|-----|--------------------|---------|-------|---|
| 5   | AC                 | 7 Unit  | Baik  | Kantor BPBD   |
| 6   | Televisi           | 1 Unit  | Rusak | Kantor BPBD   |
| 7   | Kursi Putar        | 5 Buah  | Baik  | Kantor BPBD   |
| 8   | Kursi Futura       | 50 Buah | Baik  | Kantor BPBD   |
| 9   | Noote Book / Ipad  | 10 Unit | Baik  | 1. H.Darmadi<br>Syafuruddin,SH.MSi<br>2. Susi susanti,S.Sos<br>3. Op.Siakuda<br>4. Sitti Faliha<br>5. Nurdiana,S.Sos , M.Si<br>6. Drs.Anwar Sahude<br>7. Hj.Sitti Rahmah,SE.MSi<br>8. Hj.Sakina , SE.M.Si<br>9. Sumarlinas,S.Sos<br>10. Evi Febrianti |
| 10  | Faximile           | 1 Buah  | Baik  | Kantor BPBD   |
| 11  | Mesin Ketik        | 1 Unit  | Baik  | Kantor BPBD   |
| 12  | Laptop/ Notebook   | 1 Unit  | Baik  | Haryuni,S.Sos   |
| 13. | Tablet Samsung S.3 | 1 Buah  | Rusak | H. BAHAR KADIR,SH.MH  |
| 14. | Handy Talkie (HT)  | 8 Unit  | Baik  | Kantor BPBD   |
| 15  | Kamera SONY        | 1 Buah  | Baik  | M. ILHAM, S.Sos   |
| 16  | Handycam SONY      | 1 Buah  | Rusak | H. BAHAR KADIR, SH, MH  |

2.2.8 Asset yang bersumber dari Bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Prop. Sul Sel :

| NO | NAMA JENIS BARANG        | JUMLAH | KEADAAN BARANG | PEMEGANG SEMENTARA                      |
|----|--------------------------|--------|----------------|---|
| 1  | 2                        | 3      | 4              | 5                                       |
| 1  | Genset 5 KVA             | 1 Unit | Baik           | Kantor BPBD                             |
| 2  | Radio Rig Lengkap        | 1 Set  | Baik           | Kantor BPBD                             |
| 3  | Tenda Posko              | 1 Unit | Baik           | Gudang                                  |
| 4  | Tenda Regu               | 3 Unit | Baik           | Gudang                                  |
| 5  | Tenda Peleton            | 2 Unit | Baik           | Gudang                                  |
| 6  | Tenda Keluarga           | 5 Unit | Baik           | Gudang                                  |
| 7  | Tenda Pengungsi          | 4 Unit | Baik           | Gudang                                  |
| 8  | Velbed                   | 5 Buah | Rusak          | Gudang                                  |
| 9  | Water Treatment Portable | 1 Buah | Baik           | Gudang                                  |
| 10 | Motor Triller            | 2 Unit | Baik           | Hj.Darmadi<br>.S.,SH.M.Si,M.Ilham,S.Sos |
| 11 | Mobil Barang / Rescue    | 1 Unit | Baik           | H.BAHAR<br>KADIR,SH,MH                  |
| 12 | Light Tower Portable     | 1 Unit | Baik           | Gudang                                  |
| 13 | Perahu Lipat Kecil       | 2 Unit | Baik           | Gudang                                  |
| 14 | Mesin Pompa Karhutla     | 2 Unit | Baik           | Gudang                                  |

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Setelah terbentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone pada bulan Oktober tahun 2010 dan mulai melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2011, maka dalam kurun waktu 2011 dan 2012 telah melakukan pendataan kejadian bencana, jenis kejadian bencana, jumlah korban (Kepala Keluarga) yang sebelumnya data kejadian bencana dan penanganan korban bencana belum ada lembaga/ Perangkat Daerah yang menangani khusus. Data mengenai Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 yang paling tinggi kejadian bencananya, begitu pula dengan pemetaan daerah rawan bencana yang ada di Kabupaten Bone , saat ini semua data tersebut telah tersedia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone. Data mengenai kejadian bencana di Kabupaten Bone dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

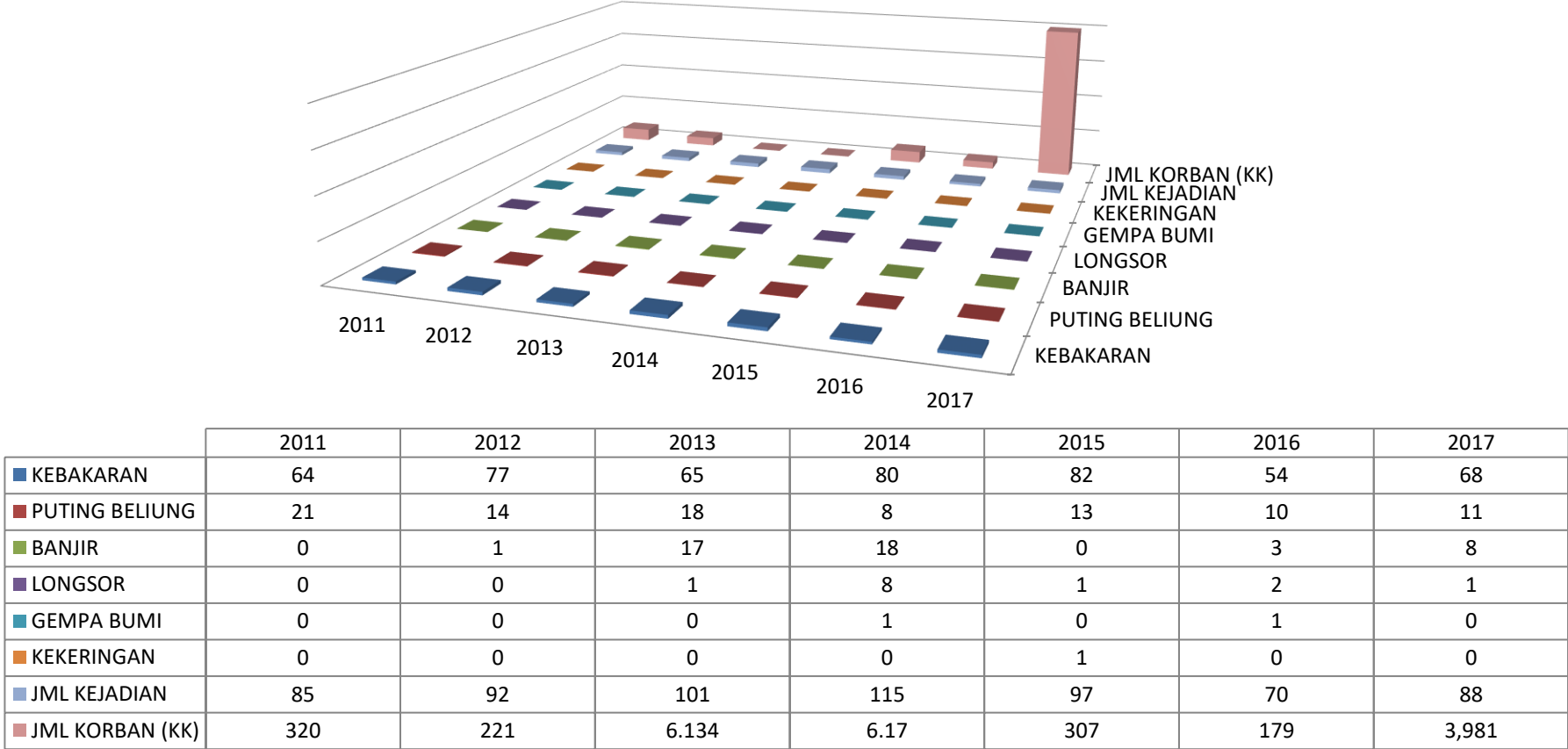


Data Kejadian Bencana

2.3.1 Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2011-2017

| N<br>O | TAHU<br>N | KEBAKA<br>RAN | PUTIN<br>G<br>BELIU<br>NG | BANJI<br>R | LONGS<br>OR | GEM<br>PA<br>BUMI | KEKERIN<br>GAN | JML<br>KEJA<br>DIAN | JML<br>KORB<br>AN<br>(KK) |
|--------|-----------|---------------|---------------------------|------------|-------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| 1      | 2011      | 64            | 21                        | -          | -           | -                 | -              | 85                  | 320                       |
| 2      | 2012      | 77            | 14                        | 1          | -           | -                 | -              | 92                  | 221                       |
| 3      | 2013      | 65            | 18                        | 17         | 1           | -                 | -              | 101                 | 6,134                     |
| 4      | 2014      | 80            | 8                         | 18         | 8           | 1                 | -              | 115                 | 6,170                     |
| 5      | 2015      | 82            | 13                        | -          | 1           | -                 | 1              | 97                  | 307                       |
| 6      | 2016      | 54            | 10                        | 3          | 2           | 1                 | -              | 70                  | 179                       |
| 7      | 2017      | 68            | 11                        | 8          | 1           | -                 | -              | 88                  | 3.981                     |
| 8      | 2018      | 90            | 22                        | 18         | 9           | -                 | -              | 139                 | 6.885                     |
| JUMLAH |           | 580           | 117                       | 65         | 22          | 2                 | 1              | 787                 | 17.312                    |

Gambar 2 : Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2011-2017



Selanjutnya data mengenai kejadian bencana per Kecamatan Tahun 2011 dan Tahun 2017 pada tabel berikut ini

Tabel 2.3.2

❖ Data Kejadian Bencana per Kecamatan Tahun 2011

| NO | KECAMATAN       | KEBAKARAN | PT.BELIUNG | BANJIR | LONGSOR | JUMLAH |
|----|-----------------|-----------|------------|--------|---------|--------|
| 1  | 2               | 3         | 4          | 5      | 6       | 7      |
| 1  | T.R. BARAT      | 16        | -          | -      | -       | 16     |
| 2  | T.RIATTANG      | 10        | 1          | -      | -       | 11     |
| 3  | DUA<br>BOCCOE   | 1         | 8          | -      | -       | 9      |
| 4  | LAMURU          | 3         | 3          | -      | -       | 6      |
| 5  | T.R. TIMUR      | 4         | 1          | -      | -       | 5      |
| 6  | PALAKA          | 3         | 2          | -      | -       | 5      |
| 7  | CENRANA         | 3         | 2          | -      | -       | 5      |
| 8  | TL.SIATTINGE    | 4         | -          | -      | -       | 4      |
| 9  | BONTO CANI      | 2         | 2          | -      | -       | 4      |
| 10 | CINA            | 4         | -          | -      | -       | 4      |
| 11 | AWANGPONE       | 1         | 2          | -      | -       | 3      |
| 12 | BAREBBO         | 1         | 2          | -      | -       | 3      |
| 13 | SIBULUE         | -         | 3          | -      | -       | 3      |
| 14 | TELLU<br>LIMPOE | 1         | 2          | -      | -       | 3      |
| 15 | AJANGALE        | 2         | -          | -      | -       | 2      |

|        |           |    |    |   |   |    |
|--------|-----------|----|----|---|---|----|
| 16     | ULAWENG   | 1  | 1  | - | - | 2  |
| 17     | LAPRI     | -  | 2  | - | - | 2  |
| 18     | LIBURENG  | 2  | -  | - | - | 2  |
| 19     | SALOMEKKO | 2  | -  | - | - | 2  |
| 20     | TONRA     | 1  | -  | - | - | 1  |
| 21     | KAJUARA   | 1  | -  | - | - | 1  |
| 22     | PATIMPENG | 1  | -  | - | - | 1  |
| 23     | BENGO     | 1  | -  | - | - | 1  |
| JUMLAH |           | 64 | 31 | 0 | - | 95 |

2.3.3 Data Kejadian Bencana per Kecamatan Tahun 2012

| NO | KECAMATAN  | KEBAKARAN | PT.BELIUNG | BANJIR | LONGSOR | JUMLAH |
|----|------------|-----------|------------|--------|---------|--------|
| 1  | 2          | 3         | 4          | 5      | 6       | 7      |
| 1  | T.R. TIMUR | 14        | 2          | -      | -       | 16     |
| 2  | T.R. BARAT | 12        | -          | -      | -       | 12     |
| 3  | T.RIATTANG | 9         | 1          | -      | -       | 10     |
| 4  | CINA       | 6         | -          | -      | -       | 6      |
| 5  | DUA BOCCOE | 3         | 2          | -      | -       | 5      |
| 6  | AWANGPONE  | 3         | 1          | -      | -       | 4      |
| 7  | BAREBBO    | 3         | 1          | -      | -       | 4      |
| 8  | SIBULUE    | 1         | 3          | -      | -       | 4      |
| 9  |            | 3         | 1          | -      | -       | 4      |

|        |              |    |    |   |   |    |
|--------|--------------|----|----|---|---|----|
|        | TL.SIATTINGE |    |    |   |   |    |
|        | TELLU        |    |    |   |   |    |
| 10     | LIMPOE       | 2  | -  | 1 | - | 3  |
| 11     | LIBURENG     | 3  | -  | - | - | 3  |
| 12     | MARE         | 2  | 1  | - | - | 3  |
| 13     | PONRE        | 3  | -  | - | - | 3  |
| 14     | KAJUARA      | 3  | -  | - | - | 3  |
| 15     | AMALI        | 3  | -  | - | - | 3  |
| 16     | AJANGALE     | -  | 2  | - | - | 2  |
| 17     | BENGO        | 2  | -  | - | - | 2  |
| 18     | LAPRI        | 2  | -  | - | - | 2  |
| 19     | SALOMEKKO    | 2  | -  | - | - | 2  |
| 20     | BONTO CANI   | 1  | -  | - | - | 1  |
| JUMLAH |              | 77 | 14 | 1 | - | 92 |

2.3.4 Data Kejadian Bencana per Kecamatan Tahun 2013

| NO | KECAMATAN  | KEBAKARAN | PT.BELIUNG | BANJIR | LONGSOR | JUMLAH |
|----|------------|-----------|------------|--------|---------|--------|
| 1  | 2          | 3         | 4          | 5      | 6       | 7      |
| 1  | DUA BOCCOE | 2         | 5          | 3      | -       | 10     |
| 2  | MARE       | 3         | 1          | 1      | -       | 5      |
| 3  | T.RIATTANG | 8         | 2          | 1      | -       | 11     |
| 4  | AJANGALE   | 1         | 2          | 2      | -       | 5      |

|        |                  |    |    |    |   |     |
|--------|------------------|----|----|----|---|-----|
| 5      | CINA             | 9  | 0  | 1  | - | 10  |
| 6      | T. R. BARAT      | 8  | 0  | 1  | - | 9   |
| 7      | SIBULUE          | 4  | 1  | 1  | - | 6   |
| 8      | TL.<br>SIATTINGE | 3  | -  | 1  | - | 4   |
| 9      | CENRANA          | -  | -  | 2  | - | 2   |
| 10     | T. R TIMUR       | -  | 1  | 1  | - | 2   |
| 11     | BAREBBO          | 4  | 1  | -  | - | 5   |
| 12     | BONTOCANI        | 2  | 2  | -  | - | 4   |
| 13     | ULAWENG          | 4  | -  | -  | - | 4   |
| 14     | AMALI            | 2  | -  | 1  | - | 3   |
| 15     | AWANGPONE        | 3  | -  | -  | - | 3   |
| 16     | BENGO            | 3  | -  | -  | - | 3   |
| 17     | PONRE            | 2  | -  | -  | 1 | 3   |
| 18     | TELLU<br>LIMPOE  | -  | 2  | -  | 1 | 3   |
| 19     | KAJUARA          | 1  | 1  | -  | - | 2   |
| 20     | LAPRI            | 2  | -  | -  | - | 2   |
| 22     | LIBURENG         | 1  | -  | 1  | - | 2   |
| 23     | PALAKKA          | 2  | -  | -  | - | 2   |
| 24     | TONRA            | -  | -  | 1  | - | 1   |
| 25     | LAMURU           | 1  | -  | -  | - | 1   |
| JUMLAH |                  | 65 | 18 | 17 | 2 | 102 |



2.3.5 Data Kejadian Bencana per Kecamatan Tahun 2014

| NO | KECAMATAN        | KEBAKARAN | PT.BELIUNG | BANJIR | LONGSOR | GEMPA BUMI | JUMLAH |
|----|------------------|-----------|------------|--------|---------|------------|--------|
| 1  | 2                | 3         | 4          | 5      | 6       | 7          | 8      |
| 1  | SIBULUE          | 2         | -          | 3      | -       | -          | 5      |
| 2  | LIBURENG         | 4         | -          | 1      | 1       | -          | 6      |
| 3  | T.R. TIMUR       | 9         | 1          | 1      | -       | -          | 11     |
| 4  | DUA<br>BOCCOE    | 3         | 1          | 1      | 1       | -          | 6      |
| 5  | CINA             | 5         | 1          | 2      | -       | -          | 8      |
| 6  | AWANGPONE        | 4         | -          | 3      | -       | -          | 7      |
| 7  | T. RIATTANG      | 5         | -          | 2      | -       | -          | 7      |
| 8  | BAREBBO          | 7         | -          | 1      | -       | -          | 8      |
| 9  | T.R BARAT        | 7         | -          | 1      | -       | -          | 8      |
| 10 | PONRE            | 4         | 1          | -      | 3       | -          | 8      |
| 11 | AJANGALE         | 1         | -          | 1      | -       | -          | 2      |
| 12 | TL.<br>SIATTINGE | 5         | -          | -      | -       | -          | 5      |
| 13 | TONRA            | -         | -          | 1      | -       | -          | 1      |
| 14 | CENRANA          | 4         | -          | -      | -       | -          | 4      |
| 15 | LAPRI            | 3         | -          | -      | 1       | -          | 4      |
| 16 | SALOMEKKO        | 1         | -          | 1      | -       | -          | 2      |
| 17 | ULAWENG          | 3         | -          | -      | -       | -          | 3      |
| 18 | BENGO            | 4         | -          | -      | -       | 1          | 5      |

|        |            |    |   |    |   |   |     |
|--------|------------|----|---|----|---|---|-----|
| 19     | KAJUARA    | 1  | - | 1  | - | - | 2   |
| 20     | PALAKKA    | 3  | - | -  | - | - | 3   |
| 22     | MARE       | 2  | 1 | -  | - | - | 3   |
| 23     | TL. LIMPOE | -  | 2 | -  | - | - | 2   |
| 24     | BONTOCANI  | 1  | 1 | -  | - | - | 2   |
| 25     | AMALI      | 1  | - | -  | - | - | 1   |
| 26     | LAMURU     | 1  | - | -  | - | - | 1   |
| 27     | KAHU       | -  | - | -  | - | - | -   |
| 28     | PATIMPENG  | -  | - | -  | - | - | -   |
| JUMLAH |            | 80 | 8 | 18 | 8 | 1 | 115 |

2.3.6 Data Kejadian Bencana per Kecamatan Tahun 2015

| NO | KECAMATAN  | KEBAKARAN | PT.BELIUNG | BANJIR | LONGSOR | JUMLAH |
|----|------------|-----------|------------|--------|---------|--------|
| 1  | 2          | 3         | 4          | 5      | 6       | 7      |
| 1  | AJANGALE   | 1         | 6          | -      | -       | 7      |
| 2  | TL. LIMPOE | 1         | -          | -      | 1       | 2      |
| 3  | LAPRI      | 3         | -          | -      | -       | 3      |
| 4  | PALAKKA    | 9         | 1          | -      | -       | 10     |
| 5  | LAMURU     | 5         | -          | -      | -       | 5      |
| 6  | BAREBBO    | 6         | -          | -      | -       | 6      |
| 7  | ULAWENG    | 2         | -          | -      | -       | 2      |
| 8  | KAJUARA    | 2         | 4          | -      | -       | 6      |

|        |             |    |    |   |   |     |
|--------|-------------|----|----|---|---|-----|
| 9      | T.R BARAT   | 8  | -  | - | - | 8   |
| 10     | T. RIATTANG | 5  | 2  | - | - | 7   |
| 11     | T. R TIMUR  | 6  | 1  | - | - | 7   |
| 12     | CENRANA     | 4  | 2  | - | - | 6   |
| 13     | BENGO       | 4  | 1  | - | - | 5   |
| 14     | SIBULUE     | 5  | -  | - | - | 5   |
| 15     | PONRE       | 3  | -  | - | - | 3   |
| 16     | CINA        | 7  | 1  | - | - | 8   |
| 17     | LIBURENG    | 2  | 4  | - | - | 6   |
| 18     | AWANGPONE   | 1  | 1  | - | - | 2   |
| 19     | BONTOCANI   | 2  | -  | - | - | 2   |
| 20     | PATIMPENG   | 2  | -  | - | - | 2   |
| 21     | AMALI       | 1  | -  | - | - | 1   |
| 22     | KAHU        | 1  | -  | - | - | 1   |
| 23     | DUA BOCCOE  | 1  | -  | - | - | 1   |
| 24     | TONRA       | 1  | -  | - | - | 1   |
| JUMLAH |             | 82 | 23 | - | 1 | 106 |

2.3.7 Data Kejadian Bencana per Kecamatan Tahun 2016

| NO | KECAMATAN | KEBAKARAN | PT.BELIUNG | BANJIR | LONGSOR | JUMLAH |
|----|-----------|-----------|------------|--------|---------|--------|
| 1  | 2         | 3         | 4          | 5      | 6       | 7      |
| 1  | AJANGALE  | 5         | -          | -      | 1       | 6      |

|    |             |    |   |   |   |    |
|----|-------------|----|---|---|---|----|
| 2  | TL. LIMPOE  | -  | - | - | - | -  |
| 3  | LAPRI       | 3  | - | 1 | - | 4  |
| 4  | PALAKKA     | 1  | - | - | - | 1  |
| 5  | LAMURU      | 2  | - | 1 | - | 3  |
| 6  | BAREBBO     | 2  | 2 | - | - | 4  |
| 7  | ULAWENG     | 2  | - | 1 | - | 3  |
| 8  | KAJUARA     | -  | - | - | - | -  |
| 9  | T.R BARAT   | 6  | 1 | - | - | 7  |
| 10 | T. RIATTANG | 12 | 5 | - | - | 17 |
| 11 | T. R TIMUR  | 5  | 1 | - | - | 6  |
| 12 | CENRANA     | -  | 2 | - | - | 2  |
| 13 | BENGO       | 4  | 1 | - | - | 5  |
| 14 | SIBULUE     | -  | - | - | - | -  |
| 15 | PONRE       | -  | - | - | - | -  |
| 16 | CINA        | 2  | - | - | - | 2  |
| 17 | LIBURENG    | 3  | 1 | - | - | 4  |
| 18 | AWANGPONE   | 4  | - | - | - | 4  |
| 19 | BONTOCANI   | -  | - | - | - | -  |
| 20 | PATIMPENG   | 1  | - | - | - | 1  |
| 21 | AMALI       | -  | - | - | - | -  |
| 22 | KAHU        | 1  | - | - | - | 1  |
| 23 | DUA BOCCOE  | 1  | - | - | 1 | 2  |
| 24 | TONRA       | -  | 1 | - | - | 1  |

|        |  |    |    |   |   |    |
|--------|--|----|----|---|---|----|
|        |  |    |    |   |   |    |
| JUMLAH |  | 54 | 14 | 3 | 2 | 73 |

2.3.8 Data Kejadian Bencana per Kecamatan Tahun 2017

| NO | KECAMATAN   | KEBAKARAN | PT.BELIUNG | BANJIR | LONGSOR | JUMLAH |
|----|-------------|-----------|------------|--------|---------|--------|
| 1  | 2           | 3         | 4          | 5      | 6       | 7      |
| 1  | AJANGALE    | 2         | -          | -      | -       | 2      |
| 2  | TL. LIMPOE  | 2         | 1          | -      | 1       | 4      |
| 3  | LAPRI       | 5         | -          | -      | -       | 5      |
| 4  | PALAKKA     | 4         | 2          | -      | -       | 6      |
| 5  | LAMURU      | 2         | -          | -      | -       | 2      |
| 6  | BAREBBO     | 6         | -          | -      | -       | 6      |
| 7  | ULAWENG     | 1         | 1          | -      | -       | 2      |
| 8  | KAJUARA     | -         | 1          | 1      | -       | 2      |
| 9  | T.R BARAT   | 5         | -          | -      | -       | 5      |
| 10 | T. RIATTANG | 8         | 2          | 1      | -       | 11     |
| 11 | T. R TIMUR  | 5         | 1          | -      | -       | 6      |
| 12 | CENRANA     | -         | 1          | 1      | -       | 2      |
| 13 | BENGO       | -         | -          | -      | -       | -      |
| 14 | SIBULUE     | 2         | 1          | 1      | -       | 4      |
| 15 | PONRE       | 3         | -          | -      | -       | 3      |
| 16 | CINA        | -         | -          | -      | -       | -      |
| 17 | LIBURENG    | 1         | 1          | -      | -       | 2      |

|        |            |    |    |   |   |    |
|--------|------------|----|----|---|---|----|
| 18     | AWANGPONE  | 5  | 1  | 1 | - | 7  |
| 19     | BONTOCANI  | 2  | -  | - | - | 2  |
| 20     | PATIMPENG  | 1  | -  | - | - | 1  |
| 21     | AMALI      | -  | -  | - | - | -  |
| 22     | KAHU       | 2  | -  | - | - | 2  |
| 23     | DUA BOCCOE | 2  | -  | 1 | - | 3  |
| 24     | TONRA      | 4  | -  | - | - | 4  |
| JUMLAH |            | 68 | 11 | 8 | 1 | 88 |

*Data mengenai Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Bone*

- ❖ *RAWAN BANJIR*
  - Kec. Ajangale
  - Kec. Dua Boccoe
  - Kec. Tellu Siattinge
  - Kec. Cenrana
  - Kec. Awangpone
  - Kec. Barebbo
  - Kec. Cina
  - Kec. Mare
  - Kec. Tonra
  - Kec. Sibulue
  - Kec. Kajuara
  - Kec. Tanete Riattang
  - Kec. Tanete Riattang Barat
  - Kec. Tanete Riattang Timur
- ❖ *RAWAN ANGIN PUTING BELIUNG*
  - Kec. Dua Boccoe
  - Kec. Tellu Siattinge
  - Kec. Cenrana

- Kec. Awangpone
- Kec. Cina
- Kec. Barebbo
- Kec. Sibulue
- Kec. Mare
- Kec. Salomekko
- Kec. Kajuara
- Kec. Kahu
- Kec. Libureng
- Kec. Bontocani
- Kec. Amali
- Kec. Lappariaja
- Kec. Lamuru
- Kec. Tellu Limpoe
- Kec. Palakka
- Kec. Tanete Riattang
- Kec. Tanete Riattang Barat

❖ *RAWAN TANAH LONGSOR*

- Kec. Tellu Limpoe
- Kec. Bontocani
- Kec. Libureng
- Kec. Lamuru
- Kec. Patimpeng
- Kec. Ponre
- Kec. Amali
- Kec. Bengo
- Kec. Lamuru
- Kec. Lappariaja
- Kec. Ajangale
- Kec. Kajuara
- Kec. Cenrana
- Kec. Dua Boccoe
- Kec. Salomekko

❖ *RAWAN KEBAKARAN*

- Kec. Tanete Riattang
- Kec. Tanete Riattang Barat
- Kec. Tanete Riattang Timur
- Kec. Tellu Siattinge
- Kec. Cina
- Kec. Bontocani
- Kec. Libureng

Tabel Pencapaian Kinerja BPBD Terlampir

Tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan dan Tabel Pendanaan Pelayanan  
OPD Terlampir...



Tabel 2.3.9  
 Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
 Kabupaten Bone

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah              | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- |         |         |         |         | Realisasi Capaian Tahun ke- |         |         |         |         | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      |
|-----|---|-------------|------------|--------------------------|---|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|------|------|------|------|
|     |   |             |            |                          | 2013                                      | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2013                        | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2013                         | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| (1) | (2)   | (3)         | (4)        | (5)                      | (6)                                       | (7)     | (8)     | (9)     | (10)    | (11)                        | (12)    | (13)    | (14)    | (15)    | (16)                         | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1   | Jumlah Kecamatan Lokasi Peninjauan dan Penanganan Korban Bencana (Kec.) |             |            |                          | 1 Tahun                                   | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun                     | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 100%                         | 100% | 100% | 100% | 100% |
|     | Jumlah Kebutuhan Dasar yang Tersalur terhadap Korban Bencana (Jenis)    |             |            |                          | -   | -       | -       | -       | 100%    | -                           | -       | -       | -       | 100%    | 100%                         | 100% | 100% | 100% | 100% |
|     | Jumlah Penyiapan Hunian Sementara Terhadap Korban Bencana (Tenda)       |             |            |                          | -   | -       | -       | -       | -       | -                           | -       | -       | -       | -       | -                            | -    | -    | -    | -    |
|     | Jumlah Penyiapan Kebutuhan Dasar Terhadap Korban Bencana (Paket)        |             |            |                          | -   | -       | 100%    | 100%    | 100%    | -                           | -       | 100%    | 100%    | 100%    | -                            | -    | 100% | 100% | 100% |

|   |   |  |  |  |      |      |      |      |         |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|---|---|--|--|--|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|
|   | Jumlah Lokasi yang Diidentifikasi dan Diverifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana (Kec.) |  |  |  | -    | -    | -    | -    | -       | -    | -    | -    | -    | -       | -    | -    | -    | -    | -    |
| 2 | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana (Laporan)                                    |  |  |  | -    | 100% | 100% | 100% | 100%    | -    | 100% | 100% | 100% | 100%    | -    | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   | Jumlah Dokumen Rencana Rehabilitasi & Rekonstruksi yang tersusun (Dokumen)                              |  |  |  | -    | -    | 100% | 100% | 100%    | -    | -    | 100% | 100% | 100%    | -    | -    | 100% | 100% | 100% |
|   | Jumlah Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang Terdampak Bencana (paket)                |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%    | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%    | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   | Jumlah Media yang digunakan dalam Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Bencana                       |  |  |  | -    | -    | 100% | 100% | 100%    | -    | -    | 100% | 100% | 100%    | -    | -    | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Jumlah Lokasi Daerah Rawan Bencana yang Dipantau (Kec.)   |  |  |  | -    | 100% | 100% | 100% | 3 Media | -    | 100% | 100% | 100% | 3 Media | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |      |      |      |      |      |
|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|
|  | Jumlah TRC yang Melakukan Posko siaga Bencana (orang)                            |  |  |  | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 27 Kec. | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 27 Kec. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Jumlah Kegiatan PRB yang dilaksanakan (Kegiatan)                                 |  |  |  | 100%    | -       | -       | -       | 100%    | 100%    | -       | -       | -       | 100%    | 100% | -    | -    | -    | 100% |
|  | Jumlah Sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi Penanggulangan Bencana (Sekolah) |  |  |  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -    | -    | -    | -    | -    |
|  | Jumlah Workshop/Pameran Pengurangan Risiko Bencana yang diikuti (kegiatan)       |  |  |  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -    | -    | -    | -    | -    |
|  | Jumlah Kecamatan Lokasi Peninjauan dan Penanganan Korban Bencana (Kec.)          |  |  |  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -    | -    | -    | -    | -    |

| Tabel 2.3.10   |                         |             |             |             |             |                                   |             |             |             |             |   |        |        |        |        |                          |           |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--------|--------|--------|--------|--------------------------|-----------|
| Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah |                         |             |             |             |             |                                   |             |             |             |             |   |        |        |        |        |                          |           |
| Kabupaten Bone   |                         |             |             |             |             |                                   |             |             |             |             |   |        |        |        |        |                          |           |
| Uraian   | Anggaran Pada Tahun ke- |             |             |             |             | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |             |             |             |             | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |        |        |        |        | Rata-rata<br>Pertumbuhan |           |
|  | 2013                    | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2013                              | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2013  | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | Anggaran                 | Realisasi |
| (1)  | (2)                     | (3)         | (4)         | (5)         | (6)         | (7)                               | (8)         | (9)         | (10)        | (11)        | (12)  | (13)   | (14)   | (15)   | (16)   | (17)                     | (18)      |
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                              | 194,099,500             | 263,197,500 | 490,206,500 | 556,430,000 | 729,915,500 | 194,099,500                       | 255,836,425 | 476,685,557 | 553,818,437 | 726,468,219 | 100%  | 94%    | 95%    | 99%    | 99%    |                          |           |
| 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | 5,000,000               | 33,697,500  | 52,550,000  | 32,903,600  | 34,000,000  | 5,000,000                         | 26,541,425  | 41,224,717  | 31,560,783  | 32,618,919  | 100%  | 78.76% | 78.44% | 95.91% | 95.93% |                          |           |
| 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  | 46,890,000              | 63,000,000  | 97,920,000  | 123,390,000 | 135,280,000 | 46,890,000                        | 63,000,000  | 95,820,000  | 122,130,000 | 133,230,000 | 100%  | 100%   | 97.85% | 98.97% | 98.48% |                          |           |
| 3 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan                     | 3,000,000               | 6,500,000   | 12,890,000  | 15,050,000  | 24,800,000  | 3,000,000                         | 6,295,000   | 12,870,000  | 15,050,000  | 24,795,000  | 100%  | 96.84% | 99.84% | 100%   | 99.97% |                          |           |
| 4 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah           | 109,500,000             | 160,000,000 | 233,400,000 | 284,515,000 | 375,000,000 | 109,500,000                       | 160,000,000 | 233,399,840 | 284,506,354 | 375,000,000 | 100%  | 100%   | 99.99% | 99.99% | 100%   |                          |           |
| 5 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran   | 29,709,500              | -           | 93,446,500  | 100,571,400 | 160,835,500 | 29,709,500                        | -           | 93,371,000  | 100,571,300 | 160,824,300 | 100%  | -      | 99.91% | 99.99% | 99.99% |                          |           |

|  |            |             |             |             |             |            |             |             |             |             |      |        |        |      |        |  |  |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|--------|--------|------|--------|--|--|
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> | 82.500.000 | 360.258.600 | 557.437.800 | 431.590.000 | 184.252.500 | 82.500.000 | 357.796.600 | 553.414.500 | 431.590.000 | 168.657.550 | 100% | 99%    | 99%    | 100% | 98%    |  |  |
| 1 Pembangunan Gedung Kantor                              | -          | -           | 360.000.000 | 235.900.000 | -           | -          | -           | 360.000.000 | 235.900.000 | -           | -    | -      | 100%   | 100% | -      |  |  |
| 2 Pengadaan Kendaraan Dinas / operasional                | -          | 33.000.000  | -           | 16.465.000  | -           | -          | 33.000.000  | -           | 16.465.000  | -           | -    | 100%   | -      | 100% | -      |  |  |
| 3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                   | 46.750.000 | 89.143.600  | 83.700.000  | -           | 33.535.000  | 46.750.000 | 89.143.600  | 83.700.000  | -           | 33.535.000  | 100% | 100%   | 100%   | 100% | 100%   |  |  |
| 4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                      | -          | 51.040.000  | 20.000.000  | 33.000.000  | 36.530.000  | -          | 51.040.000  | 20.000.000  | 33.000.000  | 36.530.000  | -    | 100%   | 100%   | 100% | 100%   |  |  |
| 5 Pengadaan Mebeleur                                     | -          | 111.250.000 | -           | 5.000.000   | -           | -          | 111.250.000 | -           | 5.000.000   | -           | -    | 100%   | -      | 100% | -      |  |  |
| 6 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor               | -          | 5.750.000   | 21.325.300  | 71.000.000  | 13.897.500  | -          | 5.750.000   | 21.101.300  | 71.000.000  | 3.897.500   | -    | 100%   | 98,94% | 100% | 100%   |  |  |
| 7 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional | 35.750.000 | 53.000.000  | 60.487.500  | 63.000.000  | 88.000.000  | 35.750.000 | 50.538.000  | 56.708.400  | 63.000.000  | 82.610.750  | 100% | 95,35% | 93,75% | 100% | 93,87% |  |  |
| 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor  | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -    | -      | -      | -    | -      |  |  |
| 9 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor     | -          | 17.075.000  | 11.925.000  | 7.225.000   | 12.290.000  | -          | 17.075.000  | 11.904.800  | 7.225.000   | 12.084.300  | -    | 100%   | 99,83% | 100% | 98,32% |  |  |
| 10 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur                   | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -           | -    | -      | -      | -    | -      |  |  |

|   |   |           |            |            |            |   |           |            |            |            |   |      |        |        |         |  |  |
|---|---|-----------|------------|------------|------------|---|-----------|------------|------------|------------|---|------|--------|--------|---------|--|--|
| <b>Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur</b>                         | - | 1.680.000 | 5.000.000  | 735.000    | 3.900.000  | - | 1.680.000 | 1.260.000  | 735.000    | 3.900.000  | - | 100% | 25%    | 100%   | 100%    |  |  |
| 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                          | - | 1.680.000 | 5.000.000  | 735.000    | 3.900.000  | - | 1.680.000 | 1.260.000  | 735.000    | 3.900.000  | - | 100% | 25,20% | 100%   | 100%    |  |  |
| <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | - | -         | 44.600.000 | 57.220.000 | 51.070.000 | - | -         | 44.424.200 | 57.219.700 | 51.069.900 | - | -    | 99,61% | 99,99% | 100,00% |  |  |
| 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD              | - | -         | 22.350.000 | 31.000.000 | 32.270.000 | - | -         | 22.174.200 | 30.999.800 | 32.269.900 | - | -    | 99,21% | 99,99% | 99,99%  |  |  |
| 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran  | - | -         | 22.250.000 | -          | 18.800.000 | - | -         | 22.250.000 | -          | 18.800.000 | - | -    | 100%   | -      | 100%    |  |  |
| 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun   | - | -         | -          | 26.220.000 | -          | - | -         | -          | 26.219.900 | -          | - | -    | -      | 99,99% | -       |  |  |
| <b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>  | - | -         | -          | 58.800.000 | 67.815.000 | - | -         | -          | 58.800.000 | 67.814.800 | - | -    | -      | 100%   | 100%    |  |  |
| 1 Penyusunan Rencana Perangkat Daerah   | - | -         | -          | 58.800.000 | 67.815.000 | - | -         | -          | 58.800.000 | 67.814.800 | - | -    | -      | 100%   | 99,99%  |  |  |

|   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |        |        |        |         |  |  |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|--------|--------|--------|---------|--|--|
| <b>Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana</b>              | 205.316.000 | 204.984.000 | 346.418.000 | 364.800.000 | 528.100.000 | 191.815.100 | 201.729.000 | 344.348.100 | 364.256.600 | 526.097.400 | 93%  | 98%    | 100%   | 100%   | 100%    |  |  |
| 1 Peninjauan dan Penanganan Korban di Lokasi Bencana                        | 205.316.000 | 204.984.000 | 212.900.000 | 228.600.000 | 276.200.000 | 191.815.100 | 201.729.000 | 212.830.100 | 228.072.600 | 274.199.800 | 93%  | 98,41% | 99,96% | 99,76% | 99,27%  |  |  |
| 2 Penyaluran Bantuan Kebutuhan Dasar terhadap Korban Bencana                | -           | -           | -           | -           | 97.000.000  | -           | -           | -           | -           | 97.000.000  | -    | -      | -      | -      | 100,00% |  |  |
| 3 Penyiapan Hunian Sementara Terhadap Korban                                | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -    | -      | -      | -      | -       |  |  |
| 4 Penyiapan Kebutuhan Dasar Terhadap Korban Bencana                         | -           | -           | 133.518.000 | 136.200.000 | 154.900.000 | -           | -           | 131.518.000 | 136.184.000 | 154.897.600 | -    | -      | -      | 99,98% | 99,99%  |  |  |
| 5 Penyelenggaraan Pusdalops   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -    | -      | -      | -      | -       |  |  |
| <b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana</b>     | 64.384.000  | 780.325.000 | 199.425.250 | 515.075.000 | 352.650.000 | 64.384.000  | 757.656.250 | 199.324.150 | 176.946.300 | 352.649.700 | 100% | 98%    | 100%   | 100%   | 100%    |  |  |
| 1 Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian akibat Bencana | -           | 80.325.000  | 73.250.000  | 104.020.000 | 140.700.000 | -           | 80.310.000  | 73.245.000  | 104.004.000 | 140.699.800 | -    | 99,98% | 99,99% | 99,98% | 99,99%  |  |  |
| 2 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                               | -           | -           | 35.186.500  | 35.380.000  | -           | -           | -           | 35.186.400  | 35.374.800  | -           | -    | -      | 99,99% | 99,98% | -       |  |  |
| 3 Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi                          | 64.384.000  | -           | -           | -           | 81.950.000  | 64.384.000  | -           | -           | -           | 81.949.900  | 100% | -      | -      | -      | 99,99%  |  |  |
| 4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terdampak Bencana            | -           | 700.000.000 | 90.988.750  | 375.675.000 | 130.000.000 | -           | 677.346.250 | 90.892.750  | 37.567.500  | 130.000.000 | -    | 96,76% | 99,89% | 100%   | 100%    |  |  |

|  |            |            |             |             |             |            |            |             |             |             |      |        |      |        |        |  |  |
|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------|--------|------|--------|--------|--|--|
| <b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Penanggulangan Bencana</b>               | 81.700.500 | 72.500.000 | 106.912.200 | 123.500.000 | 198.538.500 | 81.690.400 | 72.475.400 | 106.912.200 | 123.499.900 | 198.538.400 | 100% | 100%   | 100% | 100%   | 100%   |  |  |
| 1<br>Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Bencana melalui Brosur, Leflet, dan lain-lain   | 81.700.500 | 72.500.000 | 106.912.200 | 123.500.000 | 198.538.500 | 81.690.400 | 72.475.400 | 106.912.200 | 123.499.900 | 198.538.400 | 100% | 99,96% | 100% | 99,99% | 99,99% |  |  |
| <b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana</b> | -          | -          | 188.785.000 | 99.850.000  | 129.000.000 | -          | -          | 188.785.000 | 99.849.800  | 128.980.000 | -    | -      | 100% | 100%   | 100%   |  |  |
| 1<br>Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana  | -          | -          | 65.035.000  | -           | -           | -          | -          | 65.035.000  | -           | -           | -    | -      | 100% | -      | -      |  |  |
| 2<br>Penyuluhan dan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana                                 | -          | -          | 123.750.000 | 99.850.000  | 129.000.000 | -          | -          | 123.750.000 | 99.849.800  | 128.980.000 | -    | -      | 100% | 99,99% | 99,98% |  |  |



|   |   |   |   |   |             |   |   |   |   |             |   |   |   |   |      |  |  |
|---|---|---|---|---|-------------|---|---|---|---|-------------|---|---|---|---|------|--|--|
| <b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana</b>    | - | - | - | - | 154.758.500 | - | - | - | - | 154.758.500 | - | - | - | - | 100% |  |  |
| 1 Pemantauan Daerah Rawan Bencana                                     | - | - | - | - | 90.100.000  | - | - | - | - | 90.100.000  | - | - | - | - | 100% |  |  |
| 2 Kegiatan Pemberdayaan Posko Siaga Bencana                           | - | - | - | - | 40.300.000  | - | - | - | - | 40.300.000  | - | - | - | - | 100% |  |  |
| 3 Kegiatan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana                  | - | - | - | - | -           | - | - | - | - | -           | - | - | - | - | -    |  |  |
| 4 Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana Di Sekolah              | - | - | - | - | -           | - | - | - | - | -           | - | - | - | - | -    |  |  |
| 5 Workshop/Pameran Pengurangan Risiko Bencana                         | - | - | - | - | 24.358.500  | - | - | - | - | 24.358.500  | - | - | - | - | 100% |  |  |
| <b>Program Diklat Aparatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</b> | - | - | - | - | -           | - | - | - | - | -           | - | - | - | - | -    |  |  |
| 1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dalam Bidang Kebencanaan | - | - | - | - | -           | - | - | - | - | -           | - | - | - | - | -    |  |  |

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra bpbd Tahun 2018-2023, maka perlu dirumuskan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang akan ditempuh. Penetapan kebijakan dan strategi dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal BPBD Kabupaten Bone.

Kondisi internal mencakup kekuatan(strength) dan kelemahan (weakness).Sedangkan kondisi eksternal mencakup peluang (opportunities) dan tantangan (threats).

Berdasarkan pada pengamatan terhadap faktor internal dan eksternal tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi keempat aspek positif dan negatif dari BPBD Kabupaten Bone, sebagai berikut :

### 1. Faktor Lingkungan Internal.

#### 2 Kekuatan (strength).

Beberapa kekuatan (strength) yang dapat digunakan antara lain, sebagai berikut :

- 1) Sudah terbentuknya BPBD Kabupaten Bone sebagai salah satu lembaga yang menangani secara khusus penanggulangan bencana daerah;
- 2) Peraturan Perundang-undangan tentang penanggulangan bencana yang telah ditetapkan dan kelembagaan penanggulangan bencana daerah.
- 3) Adanya SOP tentang Kebencanaan
- 4) Sudah terbentuk Tim Reaksi Cepat (TRC)
- 5) Inovasi tentang Gerakan Masyarakat Siaga Bencana (GEMAR SIGAB),  
Gemar sigab adalah gerakan masyarakat siaga bencana,sasaran yang dituju gemar sigab adalah seluruh lapisan masyarakat dan berbagai usia dan status sosial.Kegiatan melibatkan pihak BPBD dan unsur masyarakat dimana BPBD berperan sebagai penggagas dan motivator,BPBD melakukan pembinaan dan pengembangan,pengawasan serta evaluasi inovasi ditingkat Kecamatan,Desa dan Kelurahan yang keluarannya adalah terbukti tim gemar sigab ditingkat Kecamatan,Desa dan Kelurahan ,yang mana latar belakang terbentuknya inovasi ini adalah ketika mengalami bencana masyarakat hanya bisa meratapi nasibnya lalu pasrah begitupun lalu pasrah kepada bantuan pemerintah dan orang lain

yang peduli,hal ini menyebabkan kerugian yang relatif banyak dan berjatuhnya korban akibat bencana alam,belum lagi karena keterbatasan,bantuan dari pihak pemerintah misalnya sulit tersalurkan,hal ini disebabkan sulitnya akses ke lokasi bencana atau lambatnya informasi dari masyarakat ke pihak BPBD karena ketiadaan sikap siap siaga,masyarakat harus menanggung risiko besar dan bencana yang dialaminya.Jumlah masyarakat di Kab. Bone Tahun 2017 yaitu 392.137 terdiri dari Laki-laki : 358.889 Perempuan : 392.13 Jumlah Kecamatan di Kab. Bone terdiri dari 27 Kecamatan Jumlah masyarakat yang telah mendapatkan sosialisasi Laki-laki : 200 Perempuan : 100 Jumlah Desa dan Kecamatan yang telah mendapatkan sosialisasi 15 Desa

- 6) Inovasi tentang Desa Siaga Bencana Peduli Difable (Deng Siba), Dalam Upaya untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, Badan Penanggulangan Desa Rama Anak di 5 Kecamatan yakni Kec. Dua Boccoe , Kec. T.Riattang Barat , Kec. Cina , Kec. Awangpone dan Kec. Libureng di implementasikan melalui kegiatan rintisan desa ramah anak dengan pengembangan inovasi Dengsiba( Desa Siaga Bencana Peduli Difable ). Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan advokasi untuk menciptakan suatu lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak . selama ini program dan kegiatan termasuk pembangunan , anak-anak hanya dijadikan objek dan tidak semua haknya terpenuhi , termasuk untuk berkumpul dan berpendapat itu belum ada ruang untuk anak kedepan, ingin dalam pembangunan dipikirkan juga untuk kenyamanan anak. Dengan memberlukan kegiatan rintisan desa ramah anak khususnya di BPBD ada upaya penanganan terhadap korban khususnya anak baik sebelum saat dan setelah bencana yang menimpa anak itu lebih mahal di bandingkan dengan upaya pencegahan. Pendekatan melalui system itulah yang akan dilakukan bersama dalam menciptakan suatu lingkungan yang terlindungi bagi anak dalam memenuhi hak-hak mereka . Jumlah anak penyandang disabilitas dalam keterlibatan penyelenggaraan penanggulangan bencana laki-laki dan perempuan Jumlah keseluruhan anak Laki-laki : 3.304 orang Perempuan : 3.078 orang
- 7) Inovasi tentang Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (SI PENA), Sekolah siaga bencana merupakan upaya membangun

kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana dalam rangka menggugah kesadaran seluruh unsur-unsur dalam bidang pendidikan baik individu maupun kolektif disekolah dan lingkungan sekolah baik itu sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Tujuan dari sekolah siaga bencana yaitu membangun budaya siaga dan budaya aman sekolah dengan mengembangkan jenjang sesama para berkepentingan di bidang penanganan bencana, meningkatkan kapasitas institusi sekolah dan individu dalam mewujudkan tentang belajar yang lebih aman bagi siswa, guru, anggota komunitas sekolah serta komunitas di sekeliling sekolah, menyebarluaskan dan mengembangkan pengetahuan kebencanaan ke masyarakat luas melalui jalur pendidikan sekolah Jumlah anak sekolah yang sudah mendapatkan sosialisasi penanggulangan bencana di 30 sekolah tahun 2018 Laki-laki : 751 Perempuan : 749. Jumlah anak sekolah yang sudah mendapatkan sosialisasi penanggulangan bencana di sekolah tahun 2019 di 8 Sekolah Kab. Bone yaitu 400 orang Laki-laki : 208 Perempuan : 192

- 8) Jejaring kerja dengan berbagai pihak (stakeholders).
- 9) Kepemimpinan yang konstruktif dan partisipatif.

### 3 Kelemahan (Weakness)

Beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan antara lain, sebagai berikut :

- 1) Pendanaan yang tidak sebanding dengan beban pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Sarana dan prasarana kerja yang terbatas.
- 3) Tim TRC masih didominasi tenaga honor dengan jumlah yang terbatas
- 4) Pemetaan informasi daerah rawan bencana belum menggunakan teknologi satelit.
- 5) Baru terdapat 3 kecamatan yang memiliki peta rawan bencana dari 27 kecamatan yang ada di kabupaten
- 6) Belum adanya PROTAP dan SPM tentang Kebencanaan
- 7) Ketersediaan SDM Dibiidang Kebencanaan yang masih terbatas

### 2. Faktor lingkungan external.

### 4 Peluang (Opportunities)

Beberapa peluang (opportunities) yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut :

- a. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan terbitnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Perpres, Peraturan Menteri, dan Peraturan Kepala BNPB serta Peraturan Kepala Daerah sampai saat ini regulasi untuk penanggulangan bencana terus menerus diperbaharui dan disempurnakan;
- b. Peraturan Perundang-undangan tentang penanggulangan bencana yang telah ditetapkan dan kelembagaan penanggulangan bencana daerah.
- c. Mengurangi ancaman bencana sudah menjadi komitmen pemerintah dan masyarakat;
- d. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi daerah yang aman bencana.

#### 5 Tantangan (Threats)

Seperti halnya pembangunan tantangan permasalahan utama dalam penanggulangan bencana dalam hal kinerja aparat dan kelembagaan adalah sebagai berikut :

- a. kebijakan tentang kebencanaan belum terintegrasi sampai ketingkat desa.
- b. Tingkat Kepedulian dan ketangguhan masyarakat yang masih kurang;
- c. Wilayah Potensi bencana yang cukup luas

## B A B III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- a. Belum memadainya sarana, prasarana dan sumber daya aparatur pendukung penanganan korban bencana.

Kinerja yang masih belum optimal. Pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait belum siap dalam menghadapi bencana sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa maupun kerugian material yang ditimbulkan oleh bencana. Kinerja yang belum optimal seperti belum terpadu dan menyeluruhnya koordinasi dan kerjasama dalam menghadapi situasi tanggap darurat, terutama dalam hal pengerahan tenaga pencarian dan penyelamatan serta dalam koordinasi pengumpulan dan penyaluran bantuan bagi para korban.

- b. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi kejadian bencana

Data tentang jumlah korban meninggal dan mereka yang luka-luka serta jumlah rumah yang hancur total, rusak berat dan rusak ringan kerap kali ada beberapa versi yang saling berbeda satu sama lain. Perbedaan data dalam hal jumlah korban terluka dan jenis luka yang dialami korban akan mempersulit alokasi tenaga medis dan perlengkapan medis, termasuk obat-obatan, yang dibutuhkan untuk upaya pemulihan kesehatan warga yang menjadi korban. Begitu pula dengan perbedaan data dalam hal rumah, fasilitas dan infrastruktur publik yang rusak akan menghambat penghitungan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang selanjutnya akan memperlambat pemulihan seluruh aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

- c. Belum optimalnya penanganan pasca bencana

Meningkatnya tuntutan masyarakat pada pasca bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana membutuhkan anggaran yang cukup besar. Alokasi anggaran untuk penanganan pemulihan infrastruktur akibat bencana cenderung diarahkan ke PD lain.

Adapun permasalahan lainnya yakni belum adanya perencanaan penanggulangan bencana yang komprehensif. Setiap terjadi bencana, siapa berbuat apa belum jelas, masih sangat abu-abu. Semua ingin membantu, tetapi kadang kala tidak tahu apa yang dilakukan. Apalagi pada saat sebelum terjadi bencana, apa yang harus dilakukan kadang masih bingung. Pada beberapa kegiatan malah dilakukan oleh beberapa instansi, sehingga terjadi tumpang tindih produk yang berbeda satu dengan yang lain yang malah membingungkan pengguna (pemerintah daerah). Hal seperti ini perlu dibuat suatu rencana penanggulangan bencana yang melibatkan berbagai pelaku penanggulangan bencana.

Permasalahan umum lainnya adalah besarnya kebutuhan anggaran untuk pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Dengan jumlah penduduk yang besar dan banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bahaya, banyak komunitas yang perlu menerima gladi, simulasi dan pelatihan kebencanaan. Banyak tim siaga bencana komunitas yang perlu dibentuk dan diberi sumber daya yang memadai. Selain itu, di pihak pemerintah daerah sendiri masih banyak yang perlu ditingkatkan dalam hal kelembagaan penanggulangan bencana dan kelengkapannya, masih banyak aparat pemerintah yang perlu diberi pendidikan dan pelatihan kebencanaan agar dapat melaksanakan pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko dan menyelenggarakan tanggap darurat serta pemulihan bencana dengan baik.

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

| ASPEK KAJIAN          | CAPAIAN/KONDISI SAAT INI   | STANDAR YANG DIGUNAKAN | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI                  |                | PERMASALAHAN KEWENANGAN PD          |
|-----------------------|--|------------------------|---|----------------|-------------------------------------|
|                       |  |                        | INTERNAL                                  | EKTERNAL       |                                     |
| 1                     | 2  | 3                      | 4   | 5              | 6                                   |
| Gambaran Pelayanan PD | Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, karena masih terbatasnya sumber daya aparaturnya serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana |                        | Sumber Daya Aparatur, Anggaran, Kebijakan | Landasan Hukum | Minimnya alokasi anggaran dari APBD |

|                               |  |   |   |   |   |
|-------------------------------|--|---|---|---|---|
| Sumber Dana                   | Belum optimalnya anggaran untuk penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana          | UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 8 huruf d        | Belum dilaksanakan nya beberapa rencana kegiatan disebabkan kurangnya anggaran                                      | Penanganan bencana yang komprehensif memerlukan sumber dana yang memadai  | Kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi                          |
| Pengurangan Resiko Bencana    | Belum adanya kesepakatan antar stakeholder untuk melakukan aksi bersama pengurangan resiko bencana | PP No. 21 Tahun 2008                        | Dibutuhkan kesepakatan dengan stakeholder lain dalam melaksanakan langkah pengurangan resiko bencana secara efektif | Belum adanya kesepakatan antar stakeholder untuk melakukan aksi bersama pengurangan resiko bencana secara efektif | Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan resiko bencana |
| Penanganan Darurat Bencana    | Belum optimal  | UU No. 24 Tahun 2007 & PP No. 21 Tahun 2008 | Kurangnya personil BPBD untuk cepat dalam darurat bencana   | Dibutuhkan penanganan darurat secara cepat dan akurat   | Belum optimalnya TRC  |
| Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Belum optimal  | UU No. 24 Tahun 2007 & PP No. 21 Tahun 2008 | Anggaran belum memadai  | Meningkatnya tuntutan masyarakat pada pasca bencana   | Belum optimalnya ketersediaan anggaran                                  |



### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Visi Bupati Bone 2018– 2023 yaitu “ **Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera**. Dapat diuraikan bahwa **Mandiri** berarti Kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan, **Berdaya Saing** berarti terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional, sedangkan **Sejahtera** berarti meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari uraian visi diatas dijabarkan dalam **Misi Bupati Bone 2018 – 2023** sebagai berikut yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat;
3. Meningkatkan akses , pemerataan , dan kualitas pelayanan kesehatan , pendidikan , dan sosial dasar lainnya;
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan pedesaan;
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik;

Berdasarkan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 diketahui urusan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sangat erat kaitanya dengan misi ke 1 dan ke 3 yaitu

- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- Meningkatkan akses, Pemerataan, dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial Dasar lainnya

3.2. Keterkaitan antara rumusan misi dengan pokok visi

| No. | Misi  | Pokok Visi        |
|-----|---|-------------------|
| 1.  | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN)  | Mandiri           |
| 2.  | Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat   | Mandiri/Sejahtera |
| 3.  | Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial dasar lainnya  | Sejahtera         |
| 4.  | Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan pedesaan   | Mandiri           |
| 5.  | Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik | Berdaya Saing     |
| 6.  | Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat  | Sejahtera         |

3.2.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| Visi : Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera |                                |                            |            |           |
|--|--------------------------------|----------------------------|------------|-----------|
| No.  | Misi dan Program KDH dan Wakil | Permasalahan Pelayanan OPD | Faktor     |           |
|  |                                |                            | Penghambat | Pendorong |
|  |                                |                            |            |           |

| KDH terpilih  |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN) |   |   |   |  |
| Misi 3 : Meningkatkan Akses, Pemerataan, dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Sosial Dasar lainnya  |   |   |   |  |
| 1.  | Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya dukungan sumberdaya yang memadai, jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana</li> <li>- Penanganan bantuan terhadap korban bencana pada masa darurat bencana belum sesuai harapan baik soal kebutuhan maupun jumlah bantuan terutama kepada kelompok yang rentan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya regulasi daerah sebagai landasan hukum terkait penanggulangan bencana</li> <li>- Laporan Kejadian bencana dan data korban yang terkena dampak bencana masih belum sesuai harapan sehingga menyulitkan proses tanggap darurat khususnya pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban terdampak terutama bagi kelompok rentan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan Pemerintah Pusat terhadap penanggulangan bencana cukup besar</li> <li>- Adanya bantuan peralatan dan logistik dari pemerintah pusat, sekalipun dalam jumlah yang terbatas</li> </ul> |
| 2   | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana | Penanggulangan bencana masih bersifat sektoral, belum dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh   | Belum adanya regulasi daerah sebagai landasan hukum terkait penanggulangan bencana  | Adanya regulasi yang mengatur bahwa kebijakan penanggulangan bencana harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional   |
| 3   | Program Peningkatan Kualitas dan                            | Belum terbangunnya partisipasi dan kemitraan publik serta   | Kurangnya sosialisasi serta pemberian pemahaman tentang   | Adanya regulasi yang mengatur bahwa pengurangan resiko   |

|   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
|   | Akses Informasi<br>Penanggulangan<br>Bencana                                 | swasta dalam sistem<br>penanggulangan<br>bencana   | peran serta<br>publik/masyarakat<br>dalam penyebarluasan<br>informasi<br>penanggulangan<br>bencana                  | bencana merupakan<br>tanggung jawab<br>pemerintah dalam<br>penyelenggaraan<br>penanggulangan bencana<br>melibatkan masyarakat<br>dan dunia usaha |
| 4 | Program<br>Rehabilitasi dan<br>Rekonstruksi<br>pada Tahapan<br>Pasca Bencana | Rehabilitasi dan<br>rekonstruksi pasca<br>bencana<br>membutuhkan<br>anggaran yang cukup<br>besar | Alokasi anggaran untuk<br>penanganan pemulihan<br>infrastruktur akibat<br>bencana cenderung<br>diarahkan ke PD lain | Regulasi tentang<br>pemulihan daerah pasca<br>bencana telah diatur<br>dalam peraturan<br>pemerintah  |

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

#### a. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian/Lembaga

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana bagi terwujudnya tujuan yang dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah :

1. Meningkatkan Responsibilitas Penanganan dan penanggulangan Bencana;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

#### b. Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Propinsi / Kabupaten

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana.
2. Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana.

**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan**  
**Sasaran Renstra K/L**

| Sasaran Renstra K/L                                   | Permasalahan Perangkat Daerah terkait dengan Sasaran Renstra K/L                                      | Faktor  |   |
|---|---|---|---|
|   |   | Penghambat  | Pendukung   |
| Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana | Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi kejadian bencana                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya data dan informasi yang akurat</li> <li>• Kurangnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendataan korban harus cepat, tepat dan akurat</li> <li>• Ketersediaan barang bantuan</li> <li>• Gudang layak pakai khususnya barang logistik</li> </ul>                         |
|   | Belum memadainya Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Aparatur (SDA) Pendukung penanganan korban bencana | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya jumlah personil yang ada di perangkat daerah</li> <li>• Belum memadainya peralatan dan perlengkapan bencana</li> <li>• Rendahnya kemampuan dan keterampilan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan jumlah personil yang maksimal</li> <li>• Penambahan peralatan dan perlengkapan bencana yang lengkap</li> <li>• Meningkatkan kemampuan dan keterampilan TRC</li> </ul> |

|   |   | TRC   |   |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana     | Belum optimalnya penanganan pasca bencana | Alokasi anggaran untuk penanganan pemulihan infrastruktur akibat bencana cenderung diarahkan ke PD lain | Regulasi tentang pemulihan daerah pasca bencana telah diatur dalam peraturan pemerintah |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah |   |   |   |

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

**a. Implementasi RTRW bagi Pelayanan Perangkat Daerah**

Identifikasi serta informasi tentang permasalahan RTRW daerah dapat digunakan sebagai dasar acuan penentuan daerah rawan bencana.

**b. Implementasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam Pembangunan suatu Wilayah dana tau Kebijakan, Rencana, dan atau Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLH adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang disuulkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.Melalui KLHS ini diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan Pembangunan Berkelanjutan.Kajiaan Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bone dalam penyusunan RPJMD merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan sekaligus sebagai upaya peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bone sebagaimana amanat pasal 29 ayat 1 undang-undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam proses

penyusunan KLHS RPJMD Kab.Bone keterlibatan aktif stakeholders baik institusi pemerintah, akademisi dan masyarakat telah dilaksanakan, oleh karena itu keberlanjutan pelibatan seluruh stakeholders dalam pengawasan implementasi kajian tersebut perlu tetap diperkuat agar target-target yang telah direncanakan dapat dicapai dengan hasil maksimal. Hal ini diperlukan juga untuk melihat sejauh mana target-target tersebut telah dicapai dan dapat merespon dinamika perubahan yang terjadi pada kondisi lingkungan sebagai akses dari pembangunan yang telah dilakukan di Kabupaten Bone.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Organisasi perangkat Daerah di Kabupaten Bone yang menangani urusan Penanggulangan Bencana .Badan Penanggulangan Bencana memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan erat dengan indicator yang terdapat pada tujuan nomor 1, 11 dan 13.Dari tujuan tersebut terdapat 12 Indikator yang menjadi kewenangan Badan penanggulangan Bencana Daerah.Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah diantaranya :

- Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua Negara.
- Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistic risiko bencana disemua ini, sesuai dengan The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.
- Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kajian kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, social, lingkungan, dan bencana.
- Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan focus melindungi orang miskin dan orang – orang dalam situasi rentan.

#### **Tabel Keterkaitan Program dan Kegiatan BPBD dengan TPB**

**Tabel 3.4**  
**KETERKAITAN PROGRAM DAN KEGIATAN BPBD DENGAN TPB**

| No | Tujuan  | Target  | No. Indikator | Indikator   | Target PEPRES 59/2017)                     | Target (PEPRES 59/2017)-ringkasan | Capaian | Target Capaian | Gap | Program/Kegiatan  | Alokasi Anggaran |
|----|---|---|---------------|---|--|-----------------------------------|---------|----------------|-----|---|------------------|
| 1  | Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun | Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana | 1.5.1*        | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | Menurun                           | 0.2     | 0.2            | 0   | Program : Kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana; Kegiatan : 1) Peninjauan dan penanganan korban di lokasi bencana; 2) Penyaluran bantuan dasar terhadap korban bencana; 3) Penyiapan hunian sementara terhadap korban bencana; 4) Penyiapan kebutuhan dasar terhadap korban bencana |                  |



|   |   |   |           |   |   |                             |      |      |     |   |  |
|---|---|---|-----------|---|---|-----------------------------|------|------|-----|---|--|
| 2 | Mengakhiri Kemiskinan dalam Srgala Bentuk Dimanapun | Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iljklm dan guncangan ekonomi, sosia, lingkungan, dan bencana | 1.5.1.(a) | Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana                      | Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan resiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah                   | Meningkat menjadi 39 daerah | 27   | 39   | -12 | Program : Peningkatan kualitas dan akses informasi penanggulangan bencana; Kegiatan : Penyebarluasan informasi penanggulangan bencana melalui brosur, lefleaf dll |  |
| 3 | Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun | Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iljklm dan guncangan ekonomi, sosia, lingkungan, dan bencana | 1.5.1.(e) | Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi | Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dari 58 menjadi 118,6 di 133 Kabupaten/Kota (2014:169,4) | Menurun menjadi 118,6       | 1.89 | 1.89 | 0   | Program : Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; Kegiatan : 1) Pemberdayaan posko siaga bencana; 2) Workshop/pameran pengurangan risiko bencana     |  |

|   |   |   |           |   |  |         |               |               |   |  |  |
|---|---|---|-----------|---|--|---------|---------------|---------------|---|--|--|
| 4 | Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun | Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana | 1.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.                              | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | Menurun | 7,262,730,000 | 7,262,730,000 | - | Program : Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada tahapan pasca bencana; Kegiatan : 1) Identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian akibat bencana; 2) Monitorin, evaluasi dan pelaporan; 3) Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi |  |
| 5 | Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun | Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana | 1.5.3*    | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | ada     | 3             | 3             | 0 |  |  |

|   |  |  |            |   |   |                     |      |      |   |   |  |
|---|--|--|------------|---|---|---------------------|------|------|---|---|--|
| 6 | Menjadikan Kota dan permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan | Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansional mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan | 11.5.1*    | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)                            | Menurun             |      |      |   |   |  |
| 7 | Menjadikan Kota dan permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan | Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansional mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan | 11.5.1.(a) | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)  | Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019 | Menurun menjadi 30% | 1.89 | 1.89 | 0 | Program : Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; Kegiatan : Pencegahan dan pengurangan risiko bencana |  |

|   |  |  |            |   |  |         |   |   |   |  |  |
|---|--|--|------------|---|--|---------|---|---|---|--|--|
| 8 | Menjadikan Kota dan permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan | Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansional mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan | 11.5.1.(c) | Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan | Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan | ada     | 2 | 2 | 0 | Program: Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; Kegiatan : Pemantauan daerah rawan bencana |  |
| 9 | Menjadikan Kota dan permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan | Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansional mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan | 11.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.                | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)                           | Menurun |   |   |   |  |  |

|    |  |   |         |  |  |     |  |  |  |  |  |  |
|----|--|---|---------|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|
| 10 | Menjadikan Kota dan permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan | Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplemntasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Farnework for Distater Risk Reduction 2015-2030 | 11.b.2* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017) | ada |  |  |  |  |  |  |
|----|--|---|---------|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|

|    |  |   |          |   |  |         |  |  |  |  |  |
|----|--|---|----------|---|--|---------|--|--|--|--|--|
| 11 | Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya | Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. | 13.1.1*  | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah | Menurunnya indeks risiko bencana melalui startegi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019 | ada     |  |  |  |  |  |
| 12 | Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya | Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. | 13.1.2.* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang | (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)   | Menurun |  |  |  |  |  |

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BPBD dalam gugus tugas dan fungsinya bertugas sebagai koordinator/pelaksana dalam penanggulangan bencana daerah, meliputi :

- Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsive ke preventif, dimana penanggulangan bencana lebih bertitik berat didalam perencanaan. Penanggulangan bencana lebih pada upaya-upaya pengurangan resiko bencana, daripada merespon bencana yang terjadi.
- Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk dan koordinasi lintas sector dalam tahap prabencana, tanggap darurat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan komprehensif baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab semua pihak. Jadi tidak seutuhnya tanggungjawab pemerintah/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergi dan terkoordinasi.
- Perlunya system penanggulangan bencana yang handal.
- Perlunya kapasitas penanggulangan bencana yang mumpuni. Bencana berdampak besar dilintas sector dan semua bidang. Mengganggu kehidupan masyarakat, oleh sebab itu semua lembaga, pihak, elemen, yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana perlu meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana.
- Penanggulangan bencana hendaknya dijadikan sebuah dasar dalam pembangunan kabupaten bone. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah perencanaan pembangunan yang mengurangi kerentanan terhadap ancaman bencana.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Jangka Menengah Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Bone**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat mengetahui hal-hal yang dicapai dalam kurun waktu 1(satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya kemampuan yang dimiliki, serta factor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan dari Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatkan Responsibilitas Penanganan dan penanggulangan Bencana

#### **4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Sasaran dari Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana
3. Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana



Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| No. | TUJUAN   | SASARAN  | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN   | BASELINE<br>2017 | TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE- |      |      |      |      |      |
|-----|--|--|--|------------------|--|------|------|------|------|------|
|     |  |  |  |                  | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2)  | (3)  | (4)  |                  |  | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  |
| 1   | Meningkatkan Responsibilitas Penanganan dan penanggulangan Bencana | Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana              | Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana                              | 11%              | 26%  | 41%  | 56%  | 70%  | 85%  | 100% |
|     |  |  | Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat | 74%              | 78%  | 82%  | 86%  | 90%  | 95%  | 100% |
|     |  |  | Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP        | 100%             | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|     |  | Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana                    | Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana                   | 100%             | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2   | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penanggulangan Bencanaan | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP  | C                | CC   | B    | B    | BB   | BB   | A    |

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone yang merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018- 2023, maka dirumuskan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

- Peningkatan pelaksanaan administrasi pelaksanaan pemerintah daerah;
- Meningkatkan Kualitas dan Akses Informasi Penanggulangan Bencana;
- Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana;
- Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

#### **5.2 Kebijakan**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka kebijakan penanggungan bencana dirumuskan sebagai berikut :

- Penataan kelembagaan, analisa jabatan, penatalaksanaan dan peningkatan pelayanan;
- Penyusunan Dokumen dan Penyebarluasan Informasi terkait Penanggulangan Bencana;
- Pemantauan dan Evaluasi Daerah Rawan Bencana Disertai Sosialisasi
- Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- Identifikasi dan verifikasi serta monev kondisi kerusakan dan kerugian akibat bencana;
- Penyusunan dokumen baku terkait rencana rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan peta rawan bencana.

Tabel T-C.26 menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah. Dalam hal ini menunjukkan bahwa tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone sudah Relevan dan Konsisten terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| VISI   | : Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera   |   |  |
| MISI I   | : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) |   |  |
| Tujuan   | Sasaran   | Strategi  | Arah Kebijakan   |
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                | 1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Kebencanaan   | 1 Peningkatan pelaksanaan administrasi pelaksanaan pemerintah daerah                                  | 1 Penataan kelembagaan, analisa jabatan, penatalaksanaan dan peningkatan pelayanan                     |
| MISI III   | : Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya. |   |  |
| Tujuan   | Sasaran   | Strategi  | Arah Kebijakan   |
| Meningkatkan Responsibilitas Penanganan dan penanggulangan Bencana | 1 Meningkatkan Kesiapsiagaan Terhadap Penanggulangan Bencana  | 1 Meningkatkan Kualitas dan Akses Informasi dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana | 1 Penyusunan Dokumen dan Penyebarluasan Informasi terkait Penanggulangan Bencana                       |
|  | 2 Meningkatkan penanganan pemulihan pasca bencana   | 2 Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi                         | 2 Pemantauan dan Evaluasi Daerah Rawan Bencana Disertai Sosialisasi                                    |
|  |   |   | 3 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Penanggulangan Bencana                                      |
|  |   |   | 1 Identifikasi dan Verifikasi Serta Monev Kondisi Kerusakan dan Kerugian akibat Bencana                |
|  |   |   | 2 Penyusunan Dokumen Baku Terkait Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Berdasarkan Peta Rawan Bencana |

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone yang akan diselenggarakan yaitu :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 5 kegiatan :**
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
  - d. Rapat – rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah
  - e. Pelaksanaan Adminstrasi Perkantoran
- 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 10 Kegiatan :**
  - a. Pembangunan Gedung Kantor
  - b. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
  - c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - e. Pengadaan Mebeleur
  - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  - h. Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor
  - i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
  - j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
- 3. Peningkatan Disiplin Aparatur**
  - a. Pengadaan Pakaian Khusus Atau Hari-Hari Tertentu
- 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
  - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
- 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan terdiri dari 3 Kegiatan :**
  - a. Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
  - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- 6. Penunjang Pemerintahan Umum**
  - a. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah

- b. Pengelolaan Website Perangkat Daerah
  - c. Promosi dan Pameran Pembangunan
- 7. Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana terdiri dari 4 Kegiatan:**
- 1. Peninjauan dan Penanganan Korban di Lokasi Bencana
  - 2. Penyaluran Bantuan Kebutuhan Dasar terhadap Korban Bencana
  - 3. Penyiapan Hunian Sementara terhadap Korban
  - 4. Penyiapan Kebutuhan Dasar terhadap Korban Bencana
  - 5. Penyelenggaraan Pusdalops
- 8. Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana terdiri dari 4 Kegiatan :**
- a. Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana
  - b. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
  - c. Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  - d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdampak Bencana
- 9. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Penanggulangan Bencana**
- Penyebarluasan informasi penanggulangan bencana melalui brosur, leaflet, dan lain-lain.
- 10. Peningkatan Peran serta dan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana terdiri dari 2 Kegiatan :**
- a. Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana
  - b. Penyuluhan dan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana
- 11. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana terdiri dari 5 Kegiatan :**
- 1. Pemantauan Daerah rantauan Rawan Bencana
  - 2. Pemberdayaan Posko Siaga Bencana
  - 3. Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana
  - 4. Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah
  - 5. Workshop/Pameran Pengurangan Resiko Bencana
- 12. Diklat Aparatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**
- Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dalam Bidang Kebencanaan

Adapun Penyajiannya dalam table sebagai berikut :

| Tabel 6.1  |   |      |    |    |                      |   |  |   |     |                |             |                |             |                |             |                |             |  |             |   |                                     |                                      |           |
|--|---|------|----|----|----------------------|---|--|---|-----|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah |   |      |    |    |                      |   |  |   |     |                |             |                |             |                |             |                |             |  |             |   |                                     |                                      |           |
| Tujuan   | Sasaran   | Kode |    |    | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan                           | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan                                   |     |                |             |                |             |                |             |                |             | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi      |   |                                     |                                      |           |
|  |   |      |    |    |                      |   |  | Tahun-1 (2019)  |     | Tahun-2 (2020) |             | Tahun-3 (2021) |             | Tahun-4 (2022) |             | Tahun-5 (2023) |             |  |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                                     |                                      |           |
|  |   |      |    |    |                      |   |  | Target  | Rp. | Target         | Rp.         | Target         | Rp.         | Target         | Rp.         | Target         | Rp.         |  |             | Target  | Rp.                                 |                                      |           |
| (1)  | (2)   | (3)  |    |    | (4)                  | (5)   | (6)  | (7)   | (8) | (9)            | (10)        | (11)           | (12)        | (13)           | (14)        | (15)           | (16)        | (17)   | (18)        | (19)  | (20)                                |                                      |           |
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                          | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah |      |    |    |                      | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP                         | C  | B   |     | B              |             | BB             |             | BB             |             | A              |             | A  |             |   |                                     |                                      |           |
|  |   | 1    | 19 | 01 |                      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                | Cakupan Realiasi Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)            | 100   | 100 | 1,155,433,000  | 100         | 1,276,067,900  | 100         | 1,402,766,290  | 100         | 1,536,074,519  | 100         | 1,676,839,571                                | 100         | 7,047,181,280   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | T.R Barat                            |           |
|  |   | 1    | 19 | 01 | 02                   | 1   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah Rekening Air dan Listrik yang terbayar (Rekening)                        | 24  | 24             | 60,000,000  | 24             | 66,000,000  | 24             | 72,600,000  | 24             | 79,800,000  | 24   | 87,846,000  | 120   | 366,246,000                         | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah | T.R Barat |
|  |   | 1    | 19 | 01 | 07                   | 2   | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                              | Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun (kali) | 756 | 1,164          | 549,084,000 | 1,284          | 609,084,000 | 1,404          | 669,084,000 | 1,524          | 729,084,000 | 1,644  | 789,084,000 | 7,020   | 3,345,420,000                       | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah | T.R Barat |
|  |   | 1    | 19 | 01 | 15                   | 3   | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan           | Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan bahan bacaan (Kali)                    | 96  | 96             | 22,800,000  | 120            | 25,080,000  | 120            | 27,588,000  | 120            | 30,346,800  | 120  | 33,381,480  | 576   | 139,196,280                         | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah | T.R Barat |
|  |   | 1    | 19 | 01 | 23                   | 4   | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah | Jumlah Kegiatan yang Dikuti dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi (Kegiatan)   | 65  | 65             | 299,800,000 | 70             | 329,780,000 | 75             | 362,758,000 | 80             | 399,033,800 | 85   | 438,937,180 | 375   | 1,830,308,980                       | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah | T.R Barat |
|  |   | 1    | 19 | 01 | 24                   | 5   | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran                               | Jumlah Paket Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket)             | 48  | 48             | 223,749,000 | 48             | 246,123,900 | 48             | 270,736,290 | 48             | 297,809,919 | 48   | 327,590,911 | 240   | 1,366,010,020                       | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah | T.R Barat |

|   |    |    |    |    |  |   |     |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |               |                                     |           |
|---|----|----|----|----|--|---|-----|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|-------------------------------------|-----------|
| 1 | 19 | 02 |    |    | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur      | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)   | 100 | 100 | 184,470,000 | 100 | 443,317,000 | 100 | 490,648,700 | 100 | 542,213,570 | 100 | 598,434,927 | 100 | 2,259,084,197 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | T.R Barat |
| 1 | 19 | 02 | 03 | 1  | Pembangunan Gedung Kantor                              | Jumlah Gedung Kantor yang akan Dibangun (Unit)  | -   | -   | -           | 1   | 119,900,000 | 1   | 131,890,000 | 1   | 145,079,000 | 1   | 159,586,900 | 4   | 556,455,900   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | T.R Barat |
| 1 | 19 | 02 | 05 | 2  | Pengadaan Kendaraan Dinas / operasional                | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)   | 1   | -   | -           | 1   | 19,800,000  | 1   | 21,780,000  | 2   | 23,958,000  | 2   | 26,353,800  | 6   | 91,891,800    | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | T.R Barat |
| 1 | 19 | 02 | 07 | 3  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                   | Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Paket)   | 1   | 2   | 33,800,000  | 4   | 75,000,000  | 4   | 82,500,000  | 4   | 90,750,000  | 4   | 99,825,000  | 18  | 381,875,000   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | T.R Barat |
| 1 | 19 | 02 | 09 | 4  | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                      | Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Paket)  | 3   | 2   | 22,700,000  | 5   | 75,000,000  | 5   | 82,500,000  | 5   | 90,750,000  | 5   | 99,825,000  | 22  | 370,775,000   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | T.R Barat |
| 1 | 19 | 02 | 10 | 5  | Pengadaan Mebeleur                                     | Jumlah Pengadaan Mebeleur (Paket)   | -   | 2   | 16,500,000  | 4   | 20,000,000  | 4   | 25,000,000  | 4   | 30,000,000  | 4   | 35,000,000  | 18  | 126,500,000   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | T.R Barat |
| 1 | 19 | 02 | 22 | 6  | Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor               | Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor (Kegiatan)   | 2   | 2   | 14,730,000  | 2   | 16,203,000  | 2   | 17,823,300  | 3   | 19,605,630  | 3   | 21,566,193  | 12  | 89,928,123    | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | T.R Barat |
| 1 | 19 | 02 | 24 | 7  | Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional | Jumlah pemeliharaan dan Pembayaran pajak tahunan (STNK) secara rutin/berkala selama satu tahun anggaran (Paket) | 8   | 8   | 84,000,000  | 9   | 92,400,000  | 10  | 101,640,000 | 12  | 111,804,000 | 14  | 122,984,400 | 53  | 512,828,400   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | T.R Barat |
| 1 | 19 | 02 | 26 | 8  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor  | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara (Jenis)   | -   | 0   | -           | 5   | 5,500,000   | 6   | 6,050,000   | 8   | 6,655,000   | 8   | 7,320,500   | 27  | 25,525,500    | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | T.R Barat |
| 1 | 19 | 02 | 28 | 9  | Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor     | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara (Jenis)  | 3   | 4   | 12,740,000  | 4   | 14,014,000  | 6   | 15,415,400  | 6   | 16,956,940  | 6   | 18,652,634  | 26  | 77,778,974    | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | T.R Barat |
| 1 | 19 | 02 | 29 | 10 | Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur                    | Jumlah Mebeleur yang dipelihara (Jenis)   | -   | 0   | -           | 4   | 5,500,000   | 6   | 6,050,000   | 6   | 6,655,000   | 8   | 7,320,500   | 24  | 25,525,500    | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | T.R Barat |

|  |  |   |    |    |    |                                       |  |  |     |     |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |           |
|--|--|---|----|----|----|---------------------------------------|--|--|-----|-----|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|-----------|
|  |  | 1 | 19 | 03 |    | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur (%)                                   | -  | -   | -   | 100        | 130,000,000 | 100         | 140,000,000 | 100         | 150,000,000 | 100         | 160,000,000 | 100         | 580,000,000 | Badan Penanggula ngran Bencana Dae rah | T.R Barat                              |           |
|  |  | 1 | 19 | 03 | 05 | 1                                     | Pengadaan Pakaian Khusus / Hari-hari Tertentu                                  | Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan (pasang)          | -   | 0   | -          | 130         | 130,000,000 | 140         | 140,000,000 | 150         | 150,000,000 | 160         | 160,000,000 | 580         | 580,000,000                            | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah   | T.R Barat |
|  |  | 1 | 19 | 05 |    |                                       | Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur                         | Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur (%)               | 100 | -   | -          | 100         | 215,000,000 | 100         | 236,500,000 | 100         | 260,150,000 | 100         | 286,165,000 | 100         | 997,815,000                            | Badan Penanggula ngran Bencana Dae rah | T.R Barat |
|  |  | 1 | 19 | 05 | 03 | 1                                     | Pendidikan dan Pelatihan Fornal  | jumlah ASN yang mengikuti Pendidkan dan Pelatihan Formal (orang)         | -   | 0   | -          | 5           | 175,000,000 | 5           | 192,500,000 | 5           | 211,750,000 | 5           | 232,925,000 | 20          | 812,175,000                            | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah   | T.R Barat |
|  |  | 1 | 19 | 05 | 03 | 2                                     | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Aparat yang mengikuti Bimtek (orang)                              | -   | 0   | -          | 5           | 40,000,000  | 5           | 44,000,000  | 5           | 48,400,000  | 5           | 53,240,000  | 20          | 185,640,000                            | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah   | T.R Barat |
|  |  | 1 | 19 | 06 |    |                                       | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Presentase Realisasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%) | 100 | 100 | 27,000,000 | 100         | 35,500,000  | 100         | 39,050,000  | 100         | 42,955,000  | 100         | 47,322,500  | 100         | 191,827,500                            | Badan Penanggula ngran Bencana Dae rah | T.R Barat |
|  |  | 1 | 19 | 06 | 01 | 1                                     | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD         | Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi yang tersusun (Laporan)     | 2   | 2   | 27,000,000 | 2           | 29,700,000  | 2           | 32,670,000  | 2           | 35,937,000  | 2           | 39,530,700  | 10          | 164,837,700                            | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah   | T.R Barat |
|  |  | 1 | 19 | 06 | 02 | 2                                     | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran   | Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang Tersusun (Laporan)               | 2   | -   | -          | 2           | 2,900,000   | 2           | 3,190,000   | 2           | 3,509,000   | 2           | 3,895,900   | 8           | 13,494,900                             | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah   | T.R Barat |
|  |  | 1 | 19 | 06 | 04 | 3                                     | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                                      | Jumlah Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)       | -   | -   | -          | 1           | 2,900,000   | 1           | 3,190,000   | 1           | 3,509,000   | 1           | 3,895,900   | 4           | 13,494,900                             | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah   | T.R Barat |



|  |   |   |    |    |    |   |  |  |      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |                                      |                                      |           |
|--|---|---|----|----|----|---|--|--|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
|  |   | 1 | 19 | 08 |    | Program Penunjang Pemerintahan Umum                     | Presentase Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)                      | 100  | 100% | 98,900,000  | 100%        | 208,790,000 | 100%        | 119,669,000 | 100%        | 131,635,900 | 100%        | 144,799,490 | 100%        | 1,080,459,390 | Badan Penanggula ngen Bencana Daerah | T.R Barat                            |           |
|  |   | 1 | 19 | 08 | 01 | 1   | Penyusunan Rencana Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran yang telah disusun (Dokumen) | 8    | 8           | 98,900,000  | 7           | 108,790,000 | 8           | 119,669,000 | 7           | 131,635,900 | 7           | 144,799,490 | 37            | 603,794,390                          | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah | T.R Barat |
|  |   | 1 | 19 | 08 | 02 | 2   | Pengelolaan Website Perangkat Daerah   | Jumlah pemeliharaan Website Aplikasi / Data Base yang Dikelola (Kegiatan)            | 1    | 1           | 35,000,000  | 1           | 35,000,000  | 1           | 35,000,000  | 1           | 35,000,000  | 1           | 35,000,000  | 5             | 175,000,000                          | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah | T.R Barat |
|  |   | 1 | 19 | 08 | 03 | 3   | Promosi dan Pameran Pembangunan  | Jumlah Pameran Pembangunan yang diikuti (kali)                                       | -    | -           | -           | 1           | 65,000,000  | 1           | 71,500,000  | 1           | 78,650,000  | 1           | 86,515,000  | 4             | 301,665,000                          | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah | T.R Barat |
| Meningkatkan Responsibilitas Penanganan dan penanggulangan Bencana | Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana |   |    |    |    |   | Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat | 78%  | 82%  |             | 86%         | 90%         |             | 95%         |             | 100%        |             | 100%        |             |               |                                      |                                      |           |
|  |   |   |    |    |    |   | Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP        | 100%   | 100% |             | 100%        | 100%        |             | 100%        |             | 100%        |             | 100%        |             |               |                                      |                                      |           |
|  |   | 1 | 19 | 23 |    | Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana | Cakupan Ketersedian Logistik Penanggulangan Bencana (%)                            | 100  | 100  | 288,625,000 | 100         | 404,987,500 | 100         | 445,486,250 | 100         | 490,034,875 | 100         | 539,038,362 | 100         | 2,168,171,987 | Badan Penanggula ngen Bencana Daerah | T.R Barat                            |           |
|  |   | 1 | 19 | 23 | 01 | 1   | Peninjauan dan Penangan Korban di Lokasi Bencana                                   | Jumlah Peninjauan lokasi dan Penanganan Korban Bencana (Kali)                        | 139  | 190         | 172,000,000 | 240         | 189,200,000 | 290         | 208,120,000 | 340         | 228,932,000 | 390         | 251,825,200 | 1,450         | 1,050,077,200                        | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah | Kab. Bone |
|  |   | 1 | 19 | 23 | 03 | 2   | Penyaluran Bantuan Kebutuhan Dasar terhadap Korban Bencana                         | Jumlah Kebutuhan Dasar yang Tersalur terhadap Korban Bencana (Jenis)                 | 7    | 7           | 55,625,000  | 7           | 61,187,500  | 10          | 67,306,250  | 10          | 74,036,875  | 10          | 81,440,562  | 44            | 339,596,187                          | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah | 27 Kec.   |
|  |   | 1 | 19 | 23 | 04 | 3   | Penyiapan Hunian Sementara Terhadap Korban   | Jumlah Penyiapan Hunian Sementara Terhadap Korban Bencana (Tenda)                    | -    | -           | -           | 1           | 27,500,000  | 1           | 30,250,000  | 2           | 33,275,000  | 2           | 36,602,500  | 6             | 127,627,500                          | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah | T.R Barat |
|  |   | 1 | 19 | 23 | 05 | 4   | Penyiapan Kebutuhan Dasar Terhadap Korban Bencana                                  | Jumlah Penyiapan Kebutuhan Dasar Terhadap Korban Bencana (Paket)                     | 2    | 2           | 61,000,000  | 2           | 67,100,000  | 4           | 73,810,000  | 4           | 81,191,000  | 6           | 89,310,100  | 18            | 372,411,100                          | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah | T.R Barat |
|  |   | 1 | 19 | 23 | 06 | 5   | Penyelenggaraan Pusdalops  | Jumlah dokumen data dan informasi kebencanaan (Dokumen)                              | -    | -           | -           | 1           | 60,000,000  | 1           | 66,000,000  | 1           | 72,600,000  | 1           | 79,860,000  | 4             | 278,460,000                          | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah | T.R Barat |

|   |    |    |    |    |   | Presentase Kecamatan yang Memiliki Peta Rawan Bencana                                 | 26%   | 41%   |             | 56%         |             | 70%         |             | 85%         |             | 100%        |             | 100%        |               |                                      |                                      |              |
|---|----|----|----|----|---|---|---|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
|   | 1  | 19 | 26 |    |   | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Penanggulangan Bencana               | 100   | 100   | 192,000,000 | 100         | 211,200,000 | 100         | 232,320,000 | 100         | 255,552,000 | 100         | 281,107,200 | 100         | 1,172,179,200 | Badan Penanggula ngan Bencana Daerah | T.R Barat                            |              |
|   | 1  | 19 | 26 | 01 | 1   | Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Bencana melalui Brosur, Leflat, dan lain-lain | Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan bahan bacaan (Kali)                              | 36    | 36          | 192,000,000 | 60          | 211,200,000 | 60          | 232,320,000 | 60          | 255,552,000 | 60          | 281,107,200 | 276           | 1,172,179,200                        | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah | T.R Barat    |
|   | 1  | 19 | 28 |    |   | Program Peningkatan Peran Serta dan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana | Cakupan Peningkatan Peran Serta dan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana (%) | 100   | -           | -           | 100         | 52,700,000  | 100         | 57,970,000  | 100         | 63,767,000  | 100         | 70,143,700  | 100           | 244,580,700                          | Badan Penanggula ngan Bencana Daerah | T.R Barat    |
|   | 1  | 19 | 28 | 01 | 1   | Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana  | Jumlah Relawan Penanggulangan Bencana (orang)   | -     | 0           | -           | 100         | 35,000,000  | 100         | 38,500,000  | 100         | 42,350,000  | 100         | 46,585,000  | 400           | 162,435,000                          | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah | T.R Barat    |
|   | 1  | 19 | 28 | 02 | 2   | Penyuluhan dan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana                               | Jumlah Aparat yang mengikuti Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana (orang)             | 100   | 0           | -           | 100         | 17,700,000  | 100         | 19,470,000  | 100         | 21,417,000  | 100         | 23,558,700  | 400           | 82,145,700                           | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah | T.R Barat    |
|   | 1  | 19 | 30 |    |   | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana                           | Presentase Keterseediaan Data Kejadian dan Penanggulangan Bencana (%)                     | 100   | 100         | 190,750,000 | 100         | 291,825,000 | 100         | 321,007,500 | 100         | 353,108,250 | 100         | 388,419,074 | 100           | 1,545,109,824                        | Badan Penanggula ngan Bencana Daerah | T.R Barat    |
|   | 1  | 19 | 30 | 01 | 1   | Pemantauan Daerah Rawan Bencana   | Jumlah pemantauan Lokasi Daerah Rawan Bencana (Kali)                                      | 3     | 0           | -           | 81          | 72,000,000  | 81          | 79,200,000  | 81          | 87,120,000  | 81          | 95,832,000  | 324           | 334,152,000                          | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah | 27 Kec.      |
|   | 1  | 19 | 30 | 02 | 2   | Kegiatan Pemberdayaan Posko Siaga Bencana   | Jumlah Makan minum TRC yang Melakukan Posko siaga Bencana (Kali)                          | 8,760 | 8,760       | 87,000,000  | 8,760       | 95,700,000  | 8,760       | 105,270,000 | 8,760       | 115,797,000 | 14,600      | 127,376,700 | 49,640        | 531,143,700                          | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah | T.R Barat    |
|   | 1  | 19 | 30 | 03 | 3   | Kegiatan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana                                    | Jumlah Kegiatan PRB yang dilaksanakan (Kegiatan)  | 1     | 1           | 25,250,000  | 1           | 27,775,000  | 1           | 30,552,500  | 1           | 33,607,750  | 1           | 36,968,524  | 5             | 154,153,774                          | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah | T.R Barat    |
|   | 1  | 19 | 30 | 04 | 4   | Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana Di Sekolah                                | Jumlah Sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi Penanggulangan Bencana (Sekolah)          | 30    | 30          | 78,500,000  | 30          | 86,350,000  | 30          | 94,985,000  | 30          | 104,483,500 | 30          | 114,931,850 | 150           | 479,250,350                          | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah | 1074 Sekolah |
| 1 | 19 | 30 | 05 | 5  | Workshop/Pameran Pengurangan Risiko Bencana | Jumlah Workshop/Pameran Pengurangan Risiko Bencana yang diikuti (kegiatan)            | -   | -     | -           | 1           | 10,000,000  | 1           | 11,000,000  | 1           | 12,100,000  | 1           | 13,310,000  | 4           | 46,410,000    | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah | T.R Barat                            |              |

|  |   |   |    |    |    |  |   |   |      |     |             |            |               |            |               |            |               |            |               |             |                                     |                                      |           |
|--|---|---|----|----|----|--|---|---|------|-----|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
|  |   | 1 | 19 | 31 |    | Program Diklat Aparatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Cakupan Diklat Aparatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana            | 100   | 100  | -   | 100         | 50,000,000 | 100           | 55,000,000 | 100           | 60,500,000 | 100           | 66,550,000 | 100           | 232,050,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | T.R Barat                            |           |
|  |   | 1 | 19 | 31 | 01 | 1  | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dalam Bidang Kebencanaan       | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Kebencanaan (orang)   | -    | -   | -           | 6          | 50,000,000    | 10         | 55,000,000    | 10         | 60,500,000    | 10         | 66,550,000    | 36          | 232,050,000                         | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah | T.R Barat |
|  | Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana |   |    |    |    |  | Presentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah Korban Pasca Bencana          | 100%  | 100% |     | 100%        |            | 100%          |            | 100%          |            | 100%          |            | 100%          |             |                                     |                                      |           |
|  |   | 1 | 19 | 24 |    |  | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana          | Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana  | 100  | 100 | 210,000,000 | 100        | 6,094,200,000 | 100        | 6,703,620,000 | 100        | 6,746,982,000 | 100        | 6,794,680,200 | 100         | 26,662,804,200                      | Badan Penanggula ngan Bencana Daerah | T.R Barat |
|  |   | 1 | 19 | 24 | 02 | 1  | Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian akibat Bencana | Jumlah Lokasi yang Diidentifikasi dan Diverifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana (Kali) | 81   | 81  | 158,000,000 | 81         | 173,800,000   | 81         | 191,180,000   | 81         | 210,298,000   | 81         | 231,327,800   | 405         | 964,605,800                         | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah | T.R Barat |
|  |   | 1 | 19 | 24 | 03 | 2  | Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                               | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana (Laporan)                                    | 1    | 1   | 52,000,000  | 1          | 57,200,000    | 1          | 62,920,000    | 1          | 69,212,000    | 1          | 76,133,200    | 5           | 317,465,200                         | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah | T.R Barat |
|  |   | 1 | 19 | 24 | 04 | 3  | Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi                          | Jumlah Dokumen Rencana Rehabilitasi & Rekonstruksi yang tersusun (Dokumen)                              | 1    | 0   | -           | 1          | 163,200,000   | 1          | 179,520,000   | 1          | 197,472,000   | 1          | 217,219,200   | 4           | 757,411,200                         | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah | T.R Barat |
|  |   | 1 | 19 | 24 | 05 | 4  | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terdampak Bencana            | Jumlah Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang Terdampak Bencana (paket)                | 1    | 1   | 113,322,000 | 6          | 5,700,000,000 | 6          | 6,270,000,000 | 6          | 6,270,000,000 | 6          | 6,270,000,000 | 25          | 24,623,322,000                      | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah |           |

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari rangkaian Perencanaan Pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai Pedoman dalam melaksanakan tugas.

Adapun indikator kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone yaitu Penyelenggaraan Penangulangan Bencana secara Terpadu dan Menyeluruh dengan di dukung 6 Program yaitu Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana , Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana, Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Penanggulangan Bencana, Peningkatan Peran serta dan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana, Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana, Diklat Aparatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone sudah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, hal ini dapat disajikan dalam Tabel berikut :

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| No . | Indikator  | Kondisi Awal pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |         |         |         |         | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|------|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
|      |  | Tahun 0                              | Tahun 1                     | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |  |
| (1)  | (2)  | (3)                                  | (4)                         | (5)     | (6)     | (7)     | (8)     | (9)                                      |
| 1    | Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana                              | 26%                                  | 41%                         | 56%     | 70%     | 85%     | 100%    | 100%                                     |
| 2    | Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat | 78%                                  | 82%                         | 86%     | 90%     | 95%     | 100%    | 100%                                     |

|   |   |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 3 | Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana            | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

## BAB VIII

### PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, merupakan penjabaran dari Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan analisis isu-isu strategis, potensi dan peluang serta dinamika perubahan sosial dalam masyarakat di Kabupaten Bone.

RENSTRA BPBD Kabupaten Bonetahun 2018-2023 ini merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Bone, sehingga keberhasilan dalam pelaksanaan RENSTRA ini sangat tergantung pada pemahaman dan kemampuan dalam mengembangkan sistem koordinasi dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bone.

Keberhasilan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Bone. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian Renstra Tahun 2018-2023, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Rencana Strategik ini bersifat terbuka, dinamis dan selalu menampung berbagai masukan dan perbaikan dari berbagai instansi terkait, sehingga harapan terciptanya perlindungan ancaman bencana kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Watampone, Februari 2019

**Pt. KEPALA BPBD KAB. BONE**  
**H. A. SURYA DARMA, SE. M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip. 19600424 198702 1 004